



ANALISIS MUATAN KETIMPANGAN SOSIAL PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER PROFIL PELAJAR PANCASILA UNTUK MENGHADAPI STANDARISASI PENDIDIKAN ERA HUMAN SOCIETY 5.0

Wartono¹, 

¹Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 14, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted June 1, 2024

Available online June 3, 2024

Kata Kunci :

Ketimpangan Pendidikan,
Karakter, Profil Pelajar Pancasila,
Era Human Society 5.0.

Keywords:

Educational Inequality, Character,
Pancasila Student Profile, Human
Society Era 5.0.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2022 by Author. Published by I PDM Universitas Islam Svelh-Yusuf

ABSTRAK

Pembaharuan di bidang pendidikan dilakukan terus-menerus agar mampu menghadapi berbagai tantangan sesuai perkembangan zaman. Tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan meliputi persoalan-persoalan pemerataan, mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan. Salah satu upaya bersama yang diyakini mampu memacu dan membangun keunggulan kualitas pendidikan adalah pemerataan pendidikan secara sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan dimanapun lokasi yang ada diseluruh Indonesia. Pancasila merupakan ideologi nasionalis Indonesia yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membangun karakter nasionalis di era masyarakat 5.0. Tujuan dari analisis konten ini adalah untuk mengetahui bagaimana adanya ketimpangan social dan Pendidikan bagi generasi dewasa selanjutnya akan menggunakan teknologi di era revolusi industri 5.0 dan bagaimana pancasila akan berdampak pada kehidupan bangsa. Lantas bagaimana ketimpangan social pendidikan dengan sistem pendidikan di Indonesia? Tulisan ini mengkaji tentang ketimpangan social pendidikan dengan membangun karakter profil prlajar pancasila dalam menghadapi standarisasi pendidikan menuju era human society 5.0 Penelitian ini merupakan jenis penelitian analisis konten. Metode penelitian ini adalah analisis konten inferensial. Analisis data penelitian ini dengan cara pengadaan data, pengurangan data, inferensi, dan analisis data. Dalam dunia pendidikan, belakangan ini misalnya muncul beberapa berita yang viral di media massa dan media sosial tentang masalah yang bisa dikatakan klise yaitu intoleransi. namun, tidak sedikit permasalahan lain yang terjadi di dunia pendidikan dasar dan menengah seperti masalah radikalisme dan bullying. Masalah-masalah tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggagas "Profil Pelajar Pancasila", sebuah profil ideal Pelajar Indonesia tentunya sesuai dengan Pancasila. Hasil analisis menunjukkan bahwa profil dimaksud dalam "Profil Mahasiswa Pancasila", berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, keragaman global, era human society 5.0. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam gagasan profil kemahasiswaan telah menyampaikan apa saja indikator dari "Profil Kemahasiswaan Pancasila. Profil ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa sesuai dengan kriteria siswa Indonesia dengan Pancasila yang diprakarsai oleh Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kajiannya tentang "Profil Pelajar Pancasila" yang memuat karakter-karakter yang mengacu pada Pancasila, berimplikasi untuk ketahanan pribadi siswa, dimana

*Corresponding author.

E-mail addresses: wartono@ump.ac.id (Wartono)

Profil Siswa Pancasila mengarahkan siswa untuk menjadi pribadi yang bersama berkarakter sesuai Pancasila yang terangkum dalam "Profil Pelajar Pancasila" menuju era human society 5,0. Peran pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk memberikan dorongan kepada warga negara bahwa pendidikan mempunyai arti penting dan tujuan, khususnya menjadikan bangsa Indonesia mempunyai kualitas yang dapat dipandang oleh dunia. Ketimpangan sosial yang berkaitan dengan pendidikan harus mampu diminimalisir bahkan diselesaikan agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat.

ABSTRACT

Conflict in general elections is a necessity based on the history of general elections in Indonesia, Reforms in the field of education are carried out continuously in order to be able to face various challenges according to the development of the times. The challenges faced in the education system include issues of equity, quality, relevance and efficiency of education. One of the joint efforts that is believed to be able to spur and build excellence in the quality of education is the equalization of education in terms of facilities and infrastructure that support the education process wherever the location is throughout Indonesia. Pancasila is an Indonesian nationalist ideology that can be used as a tool to build nationalist character in the era of society 5.0. The purpose of this content analysis is to find out how there is social inequality and education for the next generation of adults will use technology in the era of the industrial revolution 5.0 and how Pancasila will impact the life of the nation. So how is the social inequality of education with the education system in Indonesia? This paper examines the social inequality of education by building the character of the Pancasila student profile in facing the standardization of education towards the era of human society 5.0. This research is a type of content analysis research. This research method is inferential content analysis. Analysis of this research data by means of data procurement, data reduction, inference, and data analysis. In the world of education, for example, recently there have been several viral news stories in the mass media and social media about problems that can be said to be clichés, namely intolerance. However, there are many other problems that occur in the world of primary and secondary education such as radicalism and bullying. These problems are considered violations of the values of Pancasila. One of the efforts made is to initiate the "Pancasila Student Profile", an ideal profile of Indonesian students of course in accordance with Pancasila. The results of the analysis show that the profile referred to in the "Pancasila Student Profile" is noble, independent, critical thinking, creative, mutual cooperation, global diversity, the era of human society 5.0. The Ministry of Education and Culture in the idea of a student profile has conveyed the indicators of the "Pancasila Student Profile. This profile is an indicator used to measure how much the criteria of Indonesian students are in accordance with Pancasila which was initiated by the Center for Strengthening Character of the Ministry of Education and Culture. His study on the "Pancasila Student Profile" which contains characters that refer to Pancasila, has implications for students' personal resilience, where the Pancasila Student Profile directs students to become individuals who have characters according to Pancasila which are summarized in the "Pancasila Student Profile" towards the era of human society 5.0. The role of government and society is needed to provide encouragement to citizens that education has an important meaning and purpose, especially making the Indonesian nation have a quality that can be seen by the world. Social inequality related to education must be minimized and even resolved so that it does not become a prolonged conflict in society.

1. INTRODUCTION

Perubahan sosial adalah sebuah keniscayaan. Perkembangan sosial bergeser dari satu era ke era berikutnya dibarengi dengan perkembangan teknologi. Jepang adalah negara pertama yang secara resmi meluncurkan "society 5.0" untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi dan problem humanistic. Konsep masyarakat yang dibangun berpusat pada manusia (human centered) dan berbasis teknologi. Konsep ini berjalan beriringan antara revolusi industry 4.0 dan society era 5.0 dimana peranan manusia akan lebih besar dengan berupaya mengoptimalkan perkembangan teknologi untuk menciptakan ruang kemanusiaan yang lebih bermakna. Masyarakat Indonesia harus menyambut era ini dengan optimisme yang tinggi karena disaat negara lain sedang bermasalah dengan populasi maka negara kita justru sedang mengalami bonus demografi dimana jumlah populasi produktif lebih besar dari total keseluruhan populasi.

Ketimpangan sosial merupakan fenomena masyarakat yang bersifat global, terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, ketimpangan

sosial merupakan ancaman keamanan nasional sebab ketimpangan ini akan berakumulasi dan bersinergi dengan berbagai persoalan masyarakat yang kompleks yang dapat menjadi penghambat pembangunan negara (Rangga, 2009). Ketimpangan sosial terbagi dalam beberapa bidang, salah satunya ketimpangan di bidang pendidikan. Karena pendidikan merupakan keharusan mutlak bagi manusia, maka perlu disadari semua pihak, siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ketimpangan pendidikan sangat terlihat perbedaannya di desa dan di kota. Pendidikan di kota memang sangat berbeda dibandingkan dengan di desa, dimana kota banyaknya terdapat informasi yang ada, dan juga adanya internet yang mendunia saat ini. Sedangkan di desa tidak seperti itu bahkan sebaliknya. Di desa mempunyai komitmen untuk memperoleh pendidikan meskipun mereka jarang memperoleh informasi tentang kejadian yang ada pada saat ini. (Anas, Riana, Apsari, 2015)

Permasalahan dan dinamika yang muncul di dunia pendidikan dewasa ini semakin kompleks dengan berbagai implikasinya. Sebenarnya, masalah-masalah yang muncul dapat dikatakan sebagai problematika yang klasik atau klise, karena hal-hal yang dianggap sebagai masalah itu pada prinsipnya bukan hal yang baru, akan tetapi di era digital saat ini, dampak dari masalah tersebut lebih luas karena viral melalui media massa maupun media sosial. Di dunia pendidikan, barubaru ini mendapat perhatian publik yang cukup luas karena adanya fenomena permasalahan intoleransi. Viralnya rekaman percakapan antara Kepala Sekolah SMKN Padang dengan seorang wali murid terkait dengan masalah seragam siswi untuk memakai jilbab meskipun tidak beragama islam, menjadi trending topic dan ramai dibahas masyarakat (Esy, 2021, jppn. com, 23/01/2021. Kasus Intoleransi di SMKN 2 Padang, Kemendikbud Keluarkan Pernyataan Tegas. Link: <https://www.jppn.com/news/kasusintoleransi-di-smkn-2-padang-kemendikbudkeluarkan-pernyataan-tegas>). Tidak sedikit tokoh pendidikan yang langsung merespons secara tegas terkait dengan berita ini, bahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara kelembagaan menyampaikan bahwa hal ini adalah bentuk intoleransi, bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim meminta agar pihak terlibat diberikan sanksi tegas, seperti pemecatan (Zaking, S & Adikara, B, 2021, JawaPos.com, 29/01/2021. Nadiem Ancam Pecat Jajaran SMKN 2 Padang, Kepsek: Salah Saya di Mana?, Link: <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/29/01/2021/nadiem-ancam-pecatjajaran-smkn-2-padang-kepsek-salah-saya-dimana/>).

Sebenarnya kasus semacam ini bukanlah kasus yang baru, hal ini disampaikan oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menanggapi respons dari Mendikbud terkait kasus ini. Disamping mengapresiasi, Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri menyayangkan Nadiem A. Makarim yang hanya merespon kasus baru dan ramai dibicarakan. Iman Zanatul menyampaikan “Mas Menteri tidak mengakui secara terbuka, mengungkapkan ke publik jika fenomena intoleransi tersebut banyak dan sering terjadi dalam persekolahan di Tanah Air”, melalui keterangan tertulis pada Ahad, 24 Januari 2021. Iman melanjutkan bahwa “Kasus intoleransi di sekolah yang dilakukan secara terstruktur bukanlah kasus baru. Dalam catatan P2G, pernah ada kasus seperti pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun 2019. Jauh sebelumnya 2014 sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali. Sedangkan kasus pemaksaan jilbab kami menduga lebih banyak lagi terjadi di berbagai daerah di Indonesia” (Rahma, A & Wibowo, Eko Ari, 2021, Tempo.co, 24/01/2021 Kasus Jilbab di SMKN 2 Padang, P2G: Kasus Intoleransi Banyak Terjadi. Link: <https://nasional.tempo.co/read/1426265/kasus-jilbab-di-smkn-2-padang-p2g-kasusintoleransi-banyak-terjadi>).

Sejalan dengan pendapat P2G, Prof. Anita Lie dalam kolom opini di media cetak Kompas, memaparkan opininya bahwa terkait permasalahan intoleransi, masalah yang lain juga muncul seperti kabar tentang kasus guru SMAN 58 Ciracas, Jakarta Timur yang melakukan intervensi dalam pemilihan ketua OSIS, demikian pula yang terjadi di SMAN 6 Depok yang sempat viral di media sosial perihal yang sama yaitu masalah pemilihan ketua OSIS (Lie, 2021). Profil Pelajar Pancasila dan Konsolidasi di Sekolah. Kompas, edisi Jumat, 29 Januari 2021). Kesemua permasalahan ini ialah tentang intoleransi, karena adanya perbedaan pandangan yang dipengaruhi oleh Agama yang dianut seseorang. Namun begitu, tidak sedikit pula permasalahan-permasalahan lain yang terjadi di dunia pendidikan dasar dan menengah seperti masalah radikalisme dan perundungan. Berbagai permasalahan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemendikbud sebagai kementerian yang menaungi dunia pendidikan, telah merancang upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi problematika ini, salah satunya ialah gagasan Sekolah Penggerak yang akan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Profil yang dimaksud ialah berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebhinnekaan global. Enam hal ini disebut sebagai indikator profil pelajar Pancasila (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Bahwa dengan adanya Profil Pelajar Pancasila ini, menurut hemat peneliti ialah sebuah target siswa yang ideal sesuai dengan Pancasila. Namun permasalahannya ialah, apakah dunia pendidikan kita sudah mengenal profil pelajar Pancasila ini, apakah sosialisasi sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, utamanya di lapangan atau dalam hal ini di tingkat satuan pendidikan / sekolah. Tujuan utama penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih dalam

(intensifikasi) terkait dengan Profil Pelajar Pancasila itu sendiri. Kemudian bagaimana dampak atau implikasi yang dihasilkan dari Profil Pelajar Pancasila ini, utamanya implikasinya terhadap ketahanan pribadi siswa. Intensifikasi sendiri, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring yang dapat diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/intensifikasi>, memiliki pemaknaan “perihal meningkatkan kegiatan yang lebih hebat; pengintensifan”.

Sehingga peneliti menggunakan kata intensifikasi dengan maksud untuk mendalami terkait dengan suatu kajian dan di dalamnya terdapat ide-ide, kritik, dan ulasan terkait suatu kajian atau kebijakan tersebut. Adapun kajian yang dimaksud peneliti dalam hal ini ialah mengenai Profil Pelajar Pancasila. Ketertarikan peneliti terhadap bidang kajian dalam penelitian ini, tidak terlepas dari bidang kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti dan tim sebelumnya. Pada tahun 2018, penelitian tentang karakterisasi kewarganegaraan dalam perspektif sejarah dan hukum. Di mana di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa karakterisasi warga negara Indonesia pada prinsipnya dapat dianalisis dalam perspektif sejarah dan hukum dalam konteks sebagai kewarganegaraan dalam arti praktik dan dalam arti status (legal hukum) (Riset Grup Filsafat Politik Kewarganegaraan, 2018). Peneliti ini sebagai kajian pendukung terkait dengan analisis yang akan peneliti lakukan terhadap butir-butir indikator Profil Pelajar Pancasila dari sisi kesesuaiannya dengan karakterisasi kewarganegaraan Indonesia.

Kemudian pada tahun 2019, dilakukan penelitian tentang Strategi Peningkatan Capaian pembelajaran Mata kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan melalui Pengembangan Desain Instruksional Berorientasi KKNI, yang mana penelitian ini memaparkan bahwa desain instruksional yang di dalamnya terdapat indikator perlu diuji kesesuaiannya dengan tujuan kurikulum terbaru yang berlaku (Riset Grup Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 2019). Penelitian ini menjadi dasar ilmiah peneliti dalam bagaimana strategi pencapaian kompetensi terhadap rencana penelitian yang akan peneliti lakukan terkait dengan indikator ketercapaian profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pada tahun 2020, dilakukan penelitian tentang Konstruksi Pengembangan Materi Pembelajaran PPKn Kajian Bhinneka Tunggal Ika Berbasis Isu Aktual yang memaparkan tentang bagaimana cara melakukan konstruksi dan pengembangan materi dan juga membahas tentang indikator-indikator Kajian Bhinneka Tunggal Ika (Riset Grup Filsafat Politik Kewarganegaraan, 2020). Penelitian ini mendasari bagaimana nantinya peneliti melakukan konstruksi tentang intensifikasi Profil Pelajar Pancasila.

Terkait dengan Profil Pelajar Pancasila itu sendiri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) terus berupaya untuk mencetak penerus bangsa yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim telah menetapkan enam indikator profil Pelajar Pancasila. Keenam indikator tersebut ialah berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebhinekaan global. Keenam indikator ini tidak lepas dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035, yang disebabkan oleh perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan sedang terjadi secara global (Kearney, 2020: 3).

Atas dasar berbagai macam fenomena di dunia pendidikan yang terjadi di Indonesia, baik itu masalah-masalah klasik maupun permasalahan modern. Permasalahan klasik yang terjadi ialah masalah-masalah sosial seperti intoleransi di dunia pendidikan. Hal ini dianggap sebagai ancaman, utamanya ancaman terhadap ideologi bangsa yaitu Pancasila. Maraknya persoalan-persoalan sosial klasik seperti konflik-konflik sosial berbasis ras dan agama, pelanggaran HAM, dan ancaman radikalisme yang telah banyak memakan korban jiwa (Setyowati, A, 2019). Dalam hal radikalisme misalnya, beberapa penelitian dan lembaga survai seperti Setara Institute mencatat bahwa sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah Indonesia bersikap intoleran terhadap perbedaan. Mirisnya, penelitian-penelitian yang dilakukan sejumlah lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, 2020), the Wahid Institute (2019), Center for the Study of Religion and Culture (CSRC, 2019), dan the Habibie Center (2019) menemukan bahwa beberapa sekolah dan perguruan tinggi negeri di Indonesia terpapar paham intoleran dan radikal yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Kelompok muda menjadi target penyebaran paham tersebut karena bagi mereka kelompok muda adalah ‘investasi’ untuk melanggengkan ideologi anti Pancasila.

Fenomenanya, generasi-generasi kita dianalisis rentan dalam mengadopsi ideologi intoleran, hasil studi juga menegaskan bahwa tidak hanya menginfiltrasi kaum muda, paham-paham radikal juga ditengarai mulai menyusup ke badan-badan pemerintahan yang strategis (Sugiarto, 2020: 209-226). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh W Khozim, tentang potensi radikal agama di perguruan tinggi (Khozim, W., 2013: 289-304). Selain permasalahan klasik tersebut, dewasa ini, di dunia pendidikan Indonesia telah berkembang problematika modern, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dewasa ini, para pelajar dianggap kurang peka dan kurang terampil dalam pemecahan masalah sosial, padahal, Kemendikbud mengutip World Economic Forum memaparkan data bahwa kemampuan memecahkan masalah, sosial, proses, dan sistem adalah keterampilan yang akan paling dicari sebagai keterampilan inti di tempat kerja pada masa

mendatang. Kebanyakan pekerjaan akan mengalami perubahan dalam keterampilan (World Economic Forum, 2020: 6).

Data tersebut didukung dengan adanya perubahan “perilaku digital” yang sangat pesat di masyarakat Indonesia. Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), pada tahun 2016 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta jiwa, pada tahun 2017 meningkat 143,26 juta jiwa, dan di tahun 2018 mencapai 171,17 dari total populasi penduduk Indonesia 264,16 juta orang (APJII, 2019). Penetrasi penggunaan internet sangat tinggi, namun bertolak belakang dengan perkembangan indeks pembangunan manusia. Data angka indeks pembangunan manusia (IPM) dari United Nations Development Programme (UNDP) 2016, dimana Indonesia hanya meraih 0,689 dan berada di peringkat ke-113 dari 188 negara (UNDP, 2016). Begitu pula UNESCO dalam Global Education Monitoring (GEM) Report 2016, menempatkan pendidikan di Indonesia berada peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang. Dalam perkembangannya, pada tahun 2017, Berdasarkan Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports, pada 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622 (tirto.co.id, 2019). Hal ini dianalisis karena pemanfaatan internet yang cenderung belum maksimal. Konten yang diakses para pelajar masih jauh dari dunia pendidikan, dibuktikan oleh data APJII bahwa perilaku masyarakat dalam penggunaan internet berdasarkan konten yang diakses didominasi oleh akses konten video sebesar 45,3%, bermain game 17,1%, dan mendengarkan musik 13,3% (APJII, 2019).

Selanjutnya perlu kita sadari kita sekarang berada dalam era disrupsi atau era Revolusi Industri 4.0 berlangsung sangat cepat dan menghapus segala pakem-pakem lama yang berjaya dan berkuasa serta menggantikannya dengan pola tatanan baru. Teknologi digital menjadi motor pergerakan Revolusi Industri 4.0, kecerdasan buatan yang dipadukan dengan internet of thing (IoT) yang dibackup dengan big data mampu mengolah data dalam skala raksasa dan memaparkan sebuah kondisi secara virtual serta memberikan solusi untuk pengambilan keputusan yang tepat, efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal di atas, negara-negara maju mulai melakukan dan mengikuti perubahan. Society 5.0/Masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based) yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari Revolusi Industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia.pun digagas di Jepang pada tahun 2019.

Konsep ini hadir dengan harapan menjawab masalah revolusi Industri 4.0 dan untuk mengintegrasikan dunia maya dan dunia nyata dengan bantuan teknologi seperti AI, robot, IoT dan lainnya dalam melayani kebutuhan manusia sehingga warga masyarakat dapat merasa nyaman dan menikmati hidup. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Jika kita lihat mulai dari Society 1.0, manusia berada dalam era berburu dan mengenal tulisan, di Society 2.0 dimana manusia masuk pada era pertanian yang mulai mengenal bercocok tanam. Lalu Society 3.0 adalah era industri dimana manusia mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari, setelah itu hadirlah Society 4.0, yaitu manusia menggunakan komputer dan internet sebagai bagian dari hidupnya. Society 4.0 banyak membantu kebutuhan manusia dengan mengakses dan membagikan informasi melalui internet. Dan Society 5.0 adalah era dimana semua teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi melainkan untuk menjalani kehidupan.

Dalam Society 5.0, nilai dan gaya hidup baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Memang terdengar sulit untuk dilakukan mengingat saat ini masalah tersebut masih saja terjadi terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. namun bukan berarti tidak bisa di lakukan. Jepang sendiri sudah membuktikan sebagai Negara dengan teknologi paling maju saat ini. Tentunya dengan hal tersebut. Jepang tentunya akan terus mengembangkan teknologi hingga konsep Society 5.0 bisa terealisasi sepenuhnya.

Secara konsep, Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 tidak memiliki perbedaan yang jauh. Konsep Society 5.0 lebih memfokuskan konteks terhadap manusia. Jika Revolusi industry 4.0 menggunakan AI, dan kecerdasan buatan yang merupakan komponen utama dalam membuat perubahan di masa depan. Sedangkan Society 5.0 juga menggunakan teknologi terkini tetapi mengandalkan manusia sebagai pemain utamanya.

Pada kondisi saat ini, efek kondisi Industri 4.0 sudah terasa nyata terlihat dan larut di dalamnya. Bisnis model baru dengan strategi inovatif pun hadir. Banyak model dan strategi bisnis yang sebelumnya belum terpikirkan tetapi muncul meramaikan dan menjuarai bisnis di bidangnya, bahkan mengalahkan incumbent secara telak dan cepat. Sebagai salah satu contoh, GOJEK sebuah perusahaan yang tidak mempunyai armada, namun mempunyai nilai valuasi berkali-kali lipat dibanding dengan yang punya armada besar. Bukan hanya urusan transportasi yang terkena dampaknya, contohnya dunia perbankan pun tak luput dari terpaannya, teller bank, analis kredit, agen asuransi, kasir, resepsionis akan segera tersapu dan digantikan aplikasi di ponsel pintar. Dan tentunya masih banyak lagi bidang-bidang lainnya.

Melalui Society 5.0, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. Tentu saja diharapkan, akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dalam Society 5.0, juga ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial. Dalam Industri 4.0, dikenal adanya cyberphysical system (CPS) yang merupakan integrasi antara physical system, komputasi dan juga network/komunikasi. Dan Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber physical human systems*. Dimana human (manusia) tidak hanya dijadikan obyek (passive element), tetapi berperan aktif sebagai subyek (*active player*) yang bekerja bersama physical system dalam mencapai tujuan (*goal*). Jadi interaksi antara mesin (*physical system*) dan manusia masih tetap diperlukan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi merupakan lokomotif yang dahsyat dalam mendorong transformasi sosial di seluruh dunia dalam beberapa dasawarsa terakhir. Kebanyakan dari proses perubahan ini didasarkan kepada produksi informasi. Freddy K. Kalidjernih memaparkan bahwa teknologi informasi memainkan peran penting dalam perubahan sosial termasuk pendidikan kewarganegaraan. Kalidjernih memaparkan bahwa pendidikan pada umumnya dan pendidikan kewarganegaraan pada khususnya dihadapkan kepada implikasiimplikasi perubahan ini, khususnya dalam hubungannya dengan kehidupan yang semakin mengglobal yang telah membentuk dan mempertajam kultur-kultur pengajaran (*teaching*) dan pembelajaran (*learning*) (Kalidjernih, 2011: 67). Selaras dengan pandangan ini, Kemendikbud merespons problematika modern ini dengan menggagas program sekolah penggerak dengan tujuan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yaitu pelajar yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebhinnekaan global. Keenam indikator ini dirumuskan dalam rangka untuk membentuk SDM yang unggul, pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Permasalahannya ialah substansi dari keenam indikator ini perlu dikaji lebih jauh untuk diketahui lebih dalam dan lebih luas bagaimana tujuan dan maksudnya. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Pelajar Pancasila dan akan melakukan penelitian mendasar terkait dengan implikasinya dengan ketahanan pribadi. Hal ini dikarenakan kajian sosial kebangsaan pada akhirnya ialah ingin mencapai ketahanan nasional dan global.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Raharjo, dkk yang menyatakan bahwa penguatan civic literacy berimplikasi pada ketahanan pribadi warga negara muda (Raharjo, dkk., 2017: 175-198). Kemudian Penelitian Ade Nur Rohim yang memaparkan hasil penelitian mengenai nilai dasar bela negara yang relevan dan dapat membangun ketahanan pribadi (Rohim, Ade Nur, 2020: 293-307) dan Joniel Hendrik Salouw, dkk yang memaparkan hasil penelitiannya bahwa peran guru dalam meningkatkan karakter disiplin siswa dapat membentuk ketahanan pribadi siswa (Salouw, J. H, dkk, 2020: 380-398). Ke semua kajian tersebut tidak lepas dari kajian Pancasila, dalam konteks Profil Pelajar Pancasila, maka peneliti mengkaji pada implikasinya terhadap ketahanan pribadi siswa.

Lebih menarik lagi, Samudro (2020) melihat Pancasila sebagai institusi penggerak transformasi struktur sosial bagi bangsa Indonesia. Dalam artikelnya di jelaskan pola dasar Pancasila yang terkait dengan transformasi struktur sosial mengalami fase transformasi interrelationship berpotensi untuk saling mempengaruhi. Perubahan karakter institusi Pancasila pada orde lama dari yang bersifat natural serta kultural ideologis menjadi sebuah alat determinasi politis pada era orde baru. Hal ini disebabkan adanya kausa kumulatif negatif serta munculnya kontradiksi antar hubungan faktor struktur sosial di masyarakat yang terlihat karena adanya kemunduran aspek ekonomi yang diakhiri dengan pergerakan mendorong pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintahan tersebut diikuti dengan perubahan rezim yang sekaligus menjadi sebuah fase transformasi institusi. Bagaimana karakter institusi Pancasila dapat menjadi sebuah transformasi struktur sosial dapat dilihat misalnya pada era orde baru Pancasila digunakan sebagai institusi formal yang berfungsi sebagai sebuah alat determinasi politik untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Seiring berjalannya waktu Pancasila sebagai alat determinasi politik justru memicu terjadinya kejenuhan pilihan politik masyarakat yang bersifat kontradiktif. Kontradiksi tersebut muncul karena hilangnya hubungan struktural aspek ekonomi dengan kebebasan politik yang menyebabkan hubungan antara aspek ekonomi dengan pergerakan politik menjadi buntu.

Tidak hanya dalam aspek ekonomi dan politik saja melainkan pada aspek hukum Pancasila juga mempunyai pengaruh penting. Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, maka posisi Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dalam tatanan peraturan di Indonesia. Sehingga kedudukan hukum Pancasila ditempatkan pada tempat yang supreme atau kedudukan paling tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun dalam perkembangannya hingga saat ini beberapa kodifikasi hukum Indonesia masih menggunakan hukum warisan kolonial Belanda, namun kedudukan Pancasila dalam hal ini harus menjadi pedoman serta arahan bagi seluruh masyarakat dalam merumuskan dan menyempurnakan

seluruh aturan hukum yang ada di Indonesia. Melihat sifat hukum yang juga harus dinamis untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, maka setiap bentuk perubahan yang dilakukan harus disesuaikan dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa menjadi masyarakat adil dan sejahtera maka Pancasila wajib menjadi acuan pembangunan hukum. Untuk mendukung tujuan tersebut peran penegakan hukum dan partisipasi aktif masyarakat sangat dinantikan juga dalam agenda membangun budaya tertib hukum di negara ini. Sesuai kondisi yang berkembang itu sudah barang tentu semua produk kebijakan atau aturan hukum yang ada di Indonesia harus berpijak pada nilai Pancasila. Namun dalam praktik bernegara perumusan serta penerapan produk hukum banyak persoalan yang belum terselesaikan yang juga disebabkan adanya pengaruh globalisasi. Persoalan-persoalan tersebut meninggalkan masalah yang sangat kompleks seperti masalah KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) ataupun masuknya budaya asing yang berdampak pada perubahan budaya warisan leluhur yang berisikan nilai kebaikan di masyarakat. Perubahan tersebut tentunya membawa dampak pada kehidupan kontemporer yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia (A.Barlian & Herista, 2021).

Artinya kalau penulis generasiasikan dengan fenomena pada saat ini pendidikan di Indonesia memasuki era 4.0. Trend pendidikan Indonesia saat ini yaitu *online learning* (Ahmad, 2018) yang menggunakan internet sebagai penghubung antara pengajar dan murid. Pendidikan adalah proses perubahan tingkah laku, penambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup agar peserta didik menjadi lebih dewasa dalam pemikiran dan sikap. Pendidikan di era digital saat ini sangatlah pesat, kemajuan dalam bidang teknologi tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa saja, anak-anak usia sekolah dasar juga sudah bisa menikmati dari hasil perkembangan teknologi saat ini. Teknologi banyak dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, sebagai sarana dan prasarana interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dengan lahirnya society 5.0 diharapkan dapat membuat teknologi dibidang pendidikan yang tidak merubah peran guru ataupun pengajar dalam mengajarkan pendidikan moral dan keteladanan bagi para peserta didik. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam menghadapi society 5.0 dibidang pendidikan. Dengan demikian terlihat ketertarikan peneliti untuk membedah dan membahas mengenai kajian Profil Pelajar Pancasila di era human society 5.0 dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana intensifikasi profil pelajar Pancasila pada dunia pendidikan di era human society 5.0?; dan bagaimana implikasi Profil Pelajar Pancasila terhadap ketahanan pribadi siswa di lapangan dalam menghadapi di era human society 5.0?.

Ketimpangan Sosial Pendidikan

Pendidikan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi hak dasar bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan secara merata dan maksimal, sebagai hak dasar maka negara yang dalam hal ini pemerintah yang menjadi penanggung jawab harus memenuhi hak mendapatkan pendidikan tersebut dengan baik. Di Indonesia telah menyatakan pentingnya pendidikan terhadap seluruh warga negara Indonesia, hal ini sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fungsi pendidikan nasional yang ditegaskan dalam UU Sisdiknas mengisyaratkan tiga ranah tujuan sebagai tujuan tuhan pendidikan yang harus di capai. Ketiga ranah itu adalah pengembangan watak dan peradaban bangsa, pencerdasan kehidupan bangsa, dan pengembangan potensi peserta didik. (Sunaryo, 2009) Oleh karena itu, perlu dikemukakan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan. Beberapa faktor tersebut secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

Rendahnya kualitas sarana sekolah. Sarana sebagai salah satu penunjang kebutuhan keberlangsungan pendidikan menjadi bagian penting, seperti gedung sekolah, media belajar, fasilitas perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Sarana pembelajaran menjadi terpuruk atau rendah terutama bagi penduduk yang di daerah terpencil/pelosok. Jika dibandingkan dengan dengan kualitas fisik yang berada di kota-kota besar, mereka memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai, mulai dengan pembangunan gedung, media belajar yang lengkap, dan sebagainya. Berkenaan dengan pemikiran yang disampaikan oleh penulis dimana rendahnya kualitas sarana sekolah dapat menyebabkan ketimpangan sangat jelas terlihat dari sekolah yang ada di kota maupun di desa yang dilihat dari fasilitas sekolah yang mereka miliki.

Rendahnya kualitas guru. Kualitas pendidikan dapat ditentukan dengan sumber daya manusia (pengajar/guru/dosen) yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pendidikan kepada peserta didik. Tenaga pengajar (guru) menjadi harapan bagi peserta didik untuk dapat mentransfer ilmu pengetahuan. Secara kualitas mutu guru di negara ini pada umumnya masih rendah. Para guru di Indonesia kurang bisa memainkan fungsinya dengan optimal. Kurangnya pengoptimalan yang dilakukan guru diseb abkan

karena pemerintah masih kurang memperhatikan para pengajar, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalismenya. Sedangkan secara kuantitatif sebenarnya jumlah guru di Indonesia relatif tidak buruk. (Anwar, 2017)

Rendahnya kesadaran kebersihan sekolah Selain itu juga disebutkan oleh (Hidayat, M 2014) bahwa kebersihan kantin sekolah masih jauh dari prinsip hygiene sanitasi makanan. Selain itu akibat tidak cukup tersedianya fasilitas dasar sanitasi tersebut akan mempengaruhi aspek lingkungan fisik sekolah yang lain seperti pengelolaan sampah yang tidak benar. Dampak lain dari tidak tersedianya tempat sampah yang disebutkan penulis menyebabkan sampah berserakan dan halaman sekolah menjadi kotor dan meningkatkan distribusi lalat, tikus dan vektor penyakit lainnya.

Faktor infrastruktur. Infrastruktur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Aspek infrastruktur yang berkaitan dengan tercapainya pendidikan tidak hanya jumlah dan kondisi fisik sekolah, akan tetapi mengenai aksesibilitas menuju lokasi sekolah yang memberikan kemudahan bagi peserta didik (Anwar, 2017). Hal ini menjadi bertolak belakang dengan daerah yang berada di pelosok, sehingga akses menuju sekolah sulit untuk ditempuh dan cenderung menghambat kelancaran proses belajar dari peserta didik.

Jumlah dan kualitas buku (referensi). Buku atau referensi merupakan unsur yang mampu membantu peserta didik dan tenaga pengajar untuk memudahkan proses belajar mengajar. Ketersediaan dan kualitas buku menjadi penting untuk keberlangsungan pendidikan, sebagaimana disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (Riana, 2015)

Mahalnya biaya pendidikan. Biaya pendidikan menjadi acuan dalam mendapatkan pendidikan dengan kualitas masing-masing, seperti biaya sekolah yang mahal akan mendapatkan banyak fasilitas yang sangat memadai sebagai penunjang, sebaliknya biaya yang murah hanya terdapat fasilitas penunjang seadanya. Adanya anggaran yang diberikan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan keringanan biaya khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun realitasnya, selama ini belum dapat dimaksimalkan anggaran tersebut dan belum ada pemerataannya.

Standarisasi Pendidikan yakni Sekolah Berstandar Nasional (SBN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Faktor ini menjadi sorotan yang berdampak pada kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Adanya pengelompokan sekolah tersebut berdampak pada mutu dan pelayanan yang diberikan, pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus berdasar pada landasan konstitusional bahwa pendidikan adalah hak warga negara, artinya pemenuhan hak pendidikan tersebut harusnya sama tidak ada perbedaan satu dengan lainnya. Kebijakan pemerintah mengenai RSBI justru menciptakan kesenjangan yang mencolok mengenai mutu dan pelayanan pendidikan. Pada dasarnya mutu pendidikan yang baik bukan hanya untuk sekelompok orang, melainkan untuk semua anak bangsa. (Hidayat, 2017)

Pendidikan Karakter

Pertanyaan yang selalu hadir dalam diri penulis makalah ini ketika berhadapan dengan arti penting pendidikan karakter: *Mengapa perlu pendidikan karakter? Apakah "karakter" dapat dididikkan? Karakter apa yang perlu dididikkan? Bagaimana mendidikkan aspek-aspek karakter secara efektif? Bagaimana mengukur keberhasilan sebuah pendidikan karakter? Siapa yang harus melakukan pendidikan karakter? Bagaimana hubungannya dengan bidang studi lainnya?* Pertanyaan-pertanyaan tersebut kembali diperkuat oleh kebijakan yang menjadikan pendidikan karakter sebagai "program" pendidikan nasional di Indonesia terutama dalam Kementerian Pendidikan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II. "Pendidikan karakter" bukanlah hal baru dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Namun, jagad pendidikan Indonesia kembali diramaikan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional yang mengusung pendidikan karakter lima tahun ke depan melalui Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014. Masih kental di ingatan kalangan pendidikan kita di awal Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ketika itu Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin, berusaha menghidupkan pendidikan watak dan budi pekerti – sebagai amanat Garis-garis Besar Haluan Negara 1999— terutama untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pemeo lama di dunia pendidikan nasional Indonesia yang mengatakan bahwa "ganti menteri, maka ganti kurikulum atau ganti kebijakan," menyiratkan sedikitnya dua hal. Pertama, persoalan pendidikan akan selalu dikaitkan dengan arah politik atau kebijakan pendidikan nasional, sehingga antara pendidikan dan politik selalu berhubungan sangat kuat. Kedua, ada penyederhanaan anggapan bahwa persoalan pendidikan seakan hanya sebatas masalah kurikuler atau urusan kurikulum lembaga pendidikan formal. Ada beberapa penamaan nomenklatur untuk merujuk kepada kajian pembentukan karakter peserta didik, tergantung kepada aspek penekanannya. Di antaranya yang umum dikenal ialah: Pendidikan Moral, Pendidikan Nilai, Pendidikan Relijius, Pendidikan Budi Pekerti, dan Pendidikan

Karakter itu sendiri. Masing-masing penamaan kadang-kadang digunakan secara saling bertukaran (*inter-exchanging*), misal pendidikan karakter juga merupakan pendidikan nilai atau pendidikan religius itu sendiri (Kirschenbaum, 2000). Sebagai kajian akademik, pendidikan karakter tentu saja perlu memuat syarat-syarat keilmiah akademik seperti dalam *konten* (isi), pendekatan dan metode kajian. Di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat terdapat pusat-pusat kajian pendidikan karakter (Character Education Partnership; International Center for Character Education). Pusat-pusat ini telah mengembangkan model, konten, pendekatan dan instrumen evaluasi pendidikan karakter. Tokoh-tokoh yang sering dikenal dalam pengembangan pendidikan karakter antara lain Howard Kirschenbaum, Thomas Lickona, dan Berkowitz. Pendidikan karakter berkembang dengan pendekatan kajian multidisipliner: psikologi, filsafat moral/etika, hukum, sastra/humaniora.

Terminologi "karakter" itu sendiri sedikitnya memuat dua hal: *values* (nilai-nilai) dan kepribadian. Suatu karakter merupakan cerminan dari nilai apa yang melekat dalam sebuah entitas. "Karakter yang baik" pada gilirannya adalah suatu penampakan dari nilai yang baik pula yang dimiliki oleh orang atau sesuatu, di luar persoalan apakah "baik" sebagai sesuatu yang "asli" ataukah sekadar kamufase. Dari hal ini, maka kajian pendidikan karakter akan bersentuhan dengan wilayah filsafat moral atau etika yang bersifat universal, seperti kejujuran. Pendidikan karakter sebagai pendidikan nilai menjadikan "upaya eksplisit mengajarkan nilai-nilai, untuk membantu siswa mengembangkan disposisi-disposisi guna bertindak dengan cara-cara yang pasti" (Curriculum Corporation, 2003: 33). Persoalan baik dan buruk, kebajikan-kebajikan, dan keutamaan-keutamaan menjadi aspek penting dalam pendidikan karakter semacam ini.

Sebagai aspek kepribadian, karakter merupakan cerminan dari kepribadian secara utuh dari seseorang: mentalitas, sikap dan perilaku. Pendidikan karakter semacam ini lebih tepat sebagai pendidikan budi pekerti. Pembelajaran tentang tata-krama, sopan santun, dan adat-istiadat, menjadikan pendidikan karakter semacam ini lebih menekankan kepada perilaku-perilaku aktual tentang bagaimana seseorang dapat disebut berkepribadian baik atau tidak baik berdasarkan norma-norma yang bersifat kontekstual dan kultural (Samsuri, 2011).

Bagaimana pendidikan karakter yang ideal? Dari penjelasan sederhana di atas, pendidikan karakter hendaknya mencakup aspek pembentukan kepribadian yang memuat dimensi nilai-nilai kebajikan universal dan kesadaran kultural di mana norma-norma kehidupan itu tumbuh dan berkembang. Ringkasnya, pendidikan karakter mampu membuat kesadaran transendental individu mampu terejawantah dalam perilaku yang konstruktif berdasarkan konteks kehidupan di mana ia berada: Memiliki kesadaran global, namun mampu bertindak sesuai konteks lokal.

Perpektif Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sebagai sebuah program kurikuler telah dipraktekan di sejumlah negara. Studi J. Mark Halstead dan Monica J. Taylor (2000) menunjukkan bagaimana pembelajaran dan pengajaran nilai-nilai sebagai cara membentuk karakter terpuji telah dikembangkan di sekolah-sekolah di Inggris. Peran sekolah yang menonjol terhadap pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai tersebut ialah dalam dua hal yaitu:

to build on and supplement the values children have already begun to develop by offering further exposure to a range of values that are current in society (such as equal opportunities and respect for diversity); and to help children to reflect on, make sense of and apply their own developing values (Halstead dan Taylor, 2000: 169).

Untuk membangun dan melengkapi nilai-nilai yang telah dimiliki anak agar berkembang sebagaimana nilai-nilai tersebut juga hidup dalam masyarakat, serta agar anak mampu merefleksikan, peka, dan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut, maka pendidikan karakter tidak bisa berjalan sendirian. Dalam kasus di Inggris, review penelitian tentang pengajaran nilai-nilai selama dekade 1990-an memperlihatkan bahwa pendidikan karakter yang diusung dengan kajian nilai-nilai dilakukan dengan program lintas kurikulum. Halstead dan Taylor (2000: 170-173) menemukan bahwa nilai-nilai yang diajarkan tersebut juga disajikan dalam pembelajaran *Citizenship; Personal, Social and Health Education* (PSHE); dan mata pelajaran lainnya seperti Sejarah, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Alam dan Geografi, Desain dan Teknologi, serta Pendidikan Jasmani dan Olahraga.

"Karakter warga negara yang baik" merupakan tujuan universal yang ingin dicapai dari pendidikan kewarganegaraan di negara-negara manapun di dunia. Meskipun terdapat ragam nomenklatur pendidikan kewarganegaraan di sejumlah negara (Kerr, 1999; Cholisin, 2004; Samsuri, 2004, 2009) menunjukkan bahwa pembentukan karakter warga negara yang baik tidak bisa dilepaskan dari kajian

pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Sebagai contoh, di Kanada pembentukan karakter warga negara yang baik melalui pendidikan kewarganegaraan diserahkan kepada pemerintah negara-negara bagian. Di negara bagian Alberta (Kanada) kementerian pendidikannya telah memberlakukan kebijakan pendidikan karakter bersama-sama pendidikan karakter melalui implementasi dokumen *The Heart of the Matter: Character and Citizenship Education in Alberta Schools* (2005). Dalam konteks Indonesia, di era Orde Baru pembentukan karakter warga negara nampak ditekankan kepada mata pelajaran seperti Pendidikan Moral Pancasila (PMP) maupun Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) bahkan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Di era pasca-Orde Baru, kebijakan pendidikan karakter pun ada upaya untuk "menitipkannya" melalui Pendidikan Kewarganegaraan di samping Pendidikan Agama.

Persoalannya apakah nilai-nilai pembangun karakter yang diajarkan dalam setiap mata pelajaran harus bersifat eksplisit ataukah implisit saja? Temuan Halstead dan Taylor (2000) pun menampakkan perdebatan terhadap klaim-klaim implementasi pengajaran nilai-nilai moral dalam Kurikulum Nasional di Inggris (terutama di era Pemerintahan Tony Blair). Klaim-klaim tersebut antara lain menyatakan pentingnya:

- **Sejarah** sebagai sebuah alat untuk membantu siswa mengembangkan toleransi atau komitmen rasional terhadap nilai-nilai demokratis.
- **Bahasa Inggris** sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan kemandirian dan menghormati orang lain
- **Pengajaran Bahasa Modern** untuk menjamin kebenaran dan integritas personal dalam berkomunikasi
- **Matematika** sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan tanggung jawab sosial
- **Ilmu Alam dan Geografi** sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan sikap-sikap tertentu terhadap lingkungan
- **Desain dan Teknologi** sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan nilai-nilai multikultural dan anti-rasis
- **Ekspresi Seni** sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan kualitas fundamental kemanusiaan dan tanggapan spiritual terhadap kehidupan
- **Pendidikan Jasmani dan Olah Raga** sebagai alat untuk membantu siswa mengembangkan kerjasama dan karakter bermutu lainnya (diadaptasikan dari Halstead dan Taylor, 2000: 173).

Paparan tersebut memperkuat alasan bahwa pendidikan karakter merupakan program aksi lintas kurikulum. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat diselenggarakan sebagai program kurikuler yang berdiri sendiri (*separated subject*) dan lintas kurikuler (*integrated subject*). Namun, pendidikan karakter juga dapat dilaksanakan semata-mata sebagai bagian dari program ekstra-kurikuler seperti dalam kegiatan kepanduan, layanan masyarakat (*community service*), maupun program *civic voluntary* dalam tindakan insidental seperti relawan dalam mitigasi bencana alam.

Pendidikan karakter sebagai sebuah program kurikuler dapat didekati dari perspektif programatik maupun teoritis.

a. Perspektif programatik

1. *Habit versus Reasoning*. Beberapa perspektif menekankan kepada pengembangan penalaran dan refleksi moral seseorang, perspektif lainnya menekankan kepada mempraktikkan perilaku kebajikan hingga menjadi kebiasaan (*habitual*). Adapula yang melihat keduanya sebagai hal penting.
2. *"Hard" versus "Soft" virtues*. Pertanyaan-pertanyaan: apakah disiplin diri, kesetiaan (*loyalitas*) sungguh-sungguh penting? atau, apakah kepedulian, pengorbanan, persahabatan sangat penting? Kecenderungannya untuk menjawab YA untuk kedua pertanyaan tersebut.
3. *Focus on the individual versus on the environment or community*. Apakah karakter yang tersimpan pada individu ataukah karakter yang tersimpan dalam norma-norma dan pola-pola kelompok atau konteks? Jawabnya, memilih kedua-duanya (Schaps & Williams, 1999 dalam Williams, 2000: 35).

b. Perspektif Teoritis

1. *Community of care* (Watson)
2. *constructivist approach to sociomoral development* (DeVries)
3. *child development perspectives* (Berkowitz)
4. *eclectic approach* (Lickona)

5. *traditional perspective* (Ryan) (the National Commission on Character Education dalam Williams, 2000: 36)

Instrumen Efektivitas Pendidikan Karakter

Character Education Partnership (2003) telah mengembangkan standar mutu Pendidikan Karakter sebagai alat evaluasi diri terutama bagi lembaga (sekolah/kampus) itu sendiri. Instrumen berupa skala Likert (0 – 4) dengan memuat 11 prinsip sebagai berikut:

1. *Effective character education promotes core ethical values as the basis of good character.*
2. *Effective character education defines “character” comprehensively to include thinking, feeling and behavior.*
3. *Effective character education uses a comprehensive, intentional, and proactive approach to character development.*
4. *Effective character education creates a caring school community.*
5. *Effective character education provides students with opportunities for moral action.*
6. *Effective character education includes a meaningful and challenging academic curriculum that respects all learners, develops their character, and helps them succeed.*
7. *Effective character education strives to develop students’ self-motivation.*
8. *Effective character education engages the school staff as a learning and moral community that shares responsibility for character education and attempts to adhere to the same core values that guide the education of students.*
9. *Effective character education fosters shared moral leadership and long-range support of the character education initiative.*
10. *Effective character education engages families and community members as partners in the character-building effort.*
11. *Effective character education assesses the character of the school, the school staff’s functioning as character educators, and the extent to which students manifest good character.* (Character Education Partnership, 2003:5-15)

Jika ke-11 prinsip tersebut diadaptasikan sebagai cara mengukur efektivitas pendidikan karakter di FISE UNY, maka pendidikan karakter di FISE UNY telah diupayakan untuk:

1. mempromosikan inti nilai-nilai etis sebagai dasar karakter yang baik (nilai-nilai etis yang pokok dapat berasal dari ajaran agama, kearifan lokal, maupun falsafah bangsa).
2. mengartikan “karakter” secara utuh termasuk pemikiran, perasaan dan perilaku (cipta, rasa, karsa dan karya dalam slogan pendidikan di UNY).
3. menggunakan pendekatan yang komprehensif, bertujuan dan proaktif untuk perkembangan karakter.
4. menciptakan suatu kepedulian pada masyarakat kampus.
5. memberikan para mahasiswa peluang untuk melakukan tindakan moral.
6. memasukkan kurikulum akademik yang bermakna dan menantang dengan menghormati semua peserta didik, mengembangkan kepribadiannya, dan membantu mereka berhasil.
7. mendorong pengembangan motivasi diri mahasiswa.
8. melibatkan staf/karyawan kampus sebagai komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi tanggungjawab untuk pendidikan karakter serta berupaya untuk mengikuti nilai-nilai inti yang sama yang memandu pendidikan para mahasiswa.
9. memupuk kepemimpinan moral dan dukungan jangka-panjang terhadap inisiatif pendidikan karakter.
10. melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya pembangunan karakter.
11. menilai karakter kampus, fungsi staf kampus sebagai pendidik karakter, dan memperluas kesempatan para mahasiswa untuk menampilkan karakter yang baik. (Samsuri, 2011)

Efektivitas implementasi program juga dipengaruhi oleh bagaimana strategi-strategi pembelajarannya dilakukan. Ada beberapa model dan strategi pembelajaran pendidikan karakter yang dapat dipergunakan, antara lain:

1. *Consensus building* (Berkowitz, Lickona)
2. *Cooperative learning* (Lickona, Watson, DeVries, Berkowitz)
3. *Literature* (Watson, DeVries, Lickona)
4. *Conflict resolution* (Lickona, Watson, DeVries, Ryan)
5. *Discussing and Engaging students in moral reasoning.*
6. *Service learning* (Watson, Ryan, Lickona, Berkowitz) (Williams, 2000: 37)

Di luar model pembelajaran karakter tersebut, ada beberapa model penting lainnya sehingga pendidikan karakter dapat efektif. Mengikuti Halstead dan Taylor (2000), pertama, adalah pendidikan karakter melalui kehidupan sekolah/kampus; Visi-misi sekolah/kampus; teladan guru/dosen, dan penegakan aturan-aturan dan disiplin. Model ini menekankan pentingnya dibangun kultur sekolah/kampus yang kondusif untuk penciptaan iklim moral yang diperlukan sebagai *direct instruction*, dengan melibatkan semua komponen penyelenggara pendidikan. Ini sebenarnya mirip dengan kesebelas instrumen efektivitas pendidikan karakter yang dirumuskan oleh Character Education Partnership (2003) di atas (Samsuri, 2011)

Kedua, penggunaan metode di dalam pembelajaran itu sendiri. Metode-metode yang dapat diterapkan antara lain dengan *problem solving*, *cooperative learning* dan *experience-based projects* yang diintegrasikan melalui pembelajaran tematik dan diskusi untuk menempatkan nilai-nilai kebajikan ke dalam praktek kehidupan, sebagai sebuah pengajaran bersifat formal (Halstead dan Taylor, 2000: 181). Metode bercerita, *Collective Worship* (Beribadah secara Berjamaah), *Circle Time* (Waktu lingkaran), Cerita Pengalaman Perorangan, Mediasi Teman Sebaya, atau pun Falsafah untuk Anak (*Philosophy for Children*) dapat digunakan sebagai alternatif pendidikan karakter (Halstead dan Taylor, 2000).

Sejalan dengan pendapat di atas, Dirjen Pendidikan Agama Islām Kementerian Agama Republik Indonesia mengemukakan bahwa karakter (character) dapat diartikan sebagai totalitas ciri-ciri pribadi yang melekat dan dapat diidentifikasi pada perilaku individu yang bersifat unik, artinya dapat membedakan antara sifat satu individu dengan yang lainnya (Mulyasa: 2011). Adapun pendidikan karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang memahami segala sifatsifat kejiwaan, akhlak, watak yang mampu menjadikan seseorang sebagai manusia yang berkarakter (Megawangi: 2007). Untuk itu semua, perlu adanya penguatan agar karakter dalam diri dan karakter bangsa tetap terjaga di era modern revolusi ini. Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) selain merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa Tahun 2010 juga merupakan bagian integral Nawacita. Dalam hal ini butir 8 Nawacita: Revolusi Karakter Bangsa dan Gerakan Revolusi Mental dalam pendidikan yang hendak mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengadakan perubahan paradigma, yaitu perubahan pola pikir dan cara bertindak, dalam mengelola sekolah. Untuk itu, Gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadatkan para pelaku pendidikan.

Pancasila Sebagai Weltanschauung

Pancasila lahir dari berbagai pandangan hidup yang berkembang dan mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Namun hal ini justru menjadi sebuah karakteristik Indonesia yang memang elemen-elemen pembentuk bangsa yang bersifat diversity. Berbagai pandangan hidup yang muncul dari banyaknya suku bangsa serta golongan tidak berdiri sendiri, namun mengandung unsur kesatuan yang mempunyai koherensi untuk dijadikan haluan bersama. Berdasarkan hal tersebut, maka pandangan hidup sudah seharusnya dirumuskan secara sistematis dan rasional, sehingga lahir Pancasila sebagai Ideologi Negara. Di samping hal itu dapat dijelaskan bahwa pandangan hidup seluruh bangsa tidak selalu sama. Dengan manusia berfilsafat, akan mencoba menggali realitas dengan pemikiran yang sedalam-dalamnya untuk mendapatkan hakikat sesuatu termasuk juga tentang pemikiran filosofi Pancasila. Pancasila yang sejak dirumuskan diyakini sebagai sebuah pandangan hidup bangsa, dijadikan prinsip dasar negara yang mempunyai makna dan syarat dengan nilai-nilai kemasyarakatan menjadi tempat rujukan dalam mencari petunjuk bagi berbagai disiplin ilmu pengetahuan (Pratiwi, 2020). Kita mungkin menyadari bahwa konsep Pancasila sebagai nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia semakin tergerus oleh perkembangan zaman.

Walaupun secara kenyataan perkembangan zaman yang disebabkan pengaruh globalisasi termasuk juga revolusi industri semakin menyudutkan kebudayaan, *volkgeist* (jiwa bangsa) maupun karya lampau sebagai warisan para pendiri bangsa yang dahulu ada. Upaya untuk memperkuat realisasi nilai Pancasila pada tatanan kehidupan masyarakat menjadi sebuah agenda penting yang wajib dijalankan oleh bangsa ini, bisa melalui penguatan seni, budaya, agama, dan dapat juga melalui kegiatan sosial pada komunitas sosial yang ada di masyarakat. Pentingnya membuka akses partisipasi masyarakat secara luas semakin mempermudah pembangunan karakter masyarakat berjiwa Pancasila sehingga bangsa Indonesia akan memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan nilai yang telah ada dan hidup selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di satu sisi dalam kondisi tertentu bentuk partisipasi masyarakat akan membangun sikap korektif pada penyelenggaraan kepemimpinan di jajaran elit untuk mewujudkan penyelenggaraan kehidupan bernegara yang seimbang sesuai dengan jiwa Pancasila (Abidin, 2020) Selaras dengan pernyataan di atas, Safitri & Dewi (2021) menjelaskan bahwa Pancasila sebagai

weltanschauung dapat dikatakan bahwa nilai yang termuat di dalam Pancasila sejatinya merupakan sesuatu yang telah lama ada lalu berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati untuk menjadi sebuah dasar Negara. Weltanschauung merupakan pandangan dunia yang di dalamnya terdapat ajaran tentang makna serta tujuan hidup manusia untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera. Nilai-nilai dari Pancasila memuat etika sebagai pedoman kehidupan secara bersama atau sebagai pedoman secara praktis bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Jiwandono & Nurbeni (2019) juga menyampaikan hal serupa bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah etika dalam kehidupan bersama bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia dapat mewujudkan nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari seperti di dalam hubungan keyakinan atau berketuhanan yang di setiap agama apapun mengajarkan saling toleransi dan menghargai walaupun berbeda keyakina. Namun di dalam perjalanan atas pengakuan sebagai sebagai Weltanschauung, Pancasila menghadapi banyak tantangan dalam upaya mempertahankan eksistensi dan konsistensinya.

Tantangan terbesar bagi pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari justru dari faktor internal yaitu merosotnya nilai-nilai kebangsaan Indonesia seperti adanya krisis multidimensi di berbagai bidang terutama karakter masyarakatnya. Beberapa di antaranya lunturnya keakraban berbangsa, tidak diperhatikannya nilai-nilai agama serta kebudayaan, budaya tolong menolong dan toleransi umat semakin rendah, semakin meluasnya paham radikalisme dan terorisme serta rasa nasionalisme dan patriotisme yang semakin hilang. Pancasila dirumuskan setelah menelaah dan meneliti nilai-nilai yang sejak lama hidup di sekitar rakyat Indonesia. Sebagaimana keberagaman manusia Indonesia itu sebagai sesuatu yang telah diberikan (given) dari Tuhan, begitu juga Pancasila. Seperti yang disampaikan oleh Soekarno dalam Pidatonya di istana Negara pada tahun 1960, beliau menjelaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan nilai-nilai yang telah di gali dari kehidupan masyarakat Indonesia sendiri menembus masa sebelum kemerdekaan, masa kerajaan yang pernah ada dan melewati zaman persebaran dan perkembangan agama bahkan melewati zaman dimana orang Indonesia belum mengenal Agama. Sila-sila yang ada merupakan kepribadian bangsa Indonesia seperti kebutuhan manusia akan religiusitas(ketuhanan), kehidupan bersama orang lain sebagai makhluk sosial, gotong royong, ingin mendapatkan kehidupan yang nyaman dan berkeadilan (Yuwono, 2020).

Profil Pelajar Pancasila

Profil Pelajar Pancasila sesuai Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) sebagaimana tertuang dalam dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020- 2024, bahwa "Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif".

Pendidikan Indonesia pada Era Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 merupakan era dimana teknologi informasi berkembang pesat dan mewarnai setiap kehidupan manusia. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya internet of things yang merambah diberbagai bidang kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu nya yaitu dibidang pendidikan. Oleh sebab itu ada beberapa upaya yang perlu dilakukan 1) revitasisasi kurikulum, 2) pemanfaatan teknologi informasi yang tepat. Menurut Muhadjir Effendy (Mendikbud) bahwa merambahnya revousi industri 4.0 masuk ke dalam dunia pendidikan maka diperlukan perbaikan kurikulum dengan peningkatan kompetensi peserta didik, antara lain (Yusnaini, 2019): 1) Critical thinking 2) Creativity and innovation 3) Interpersonal skill and communication 4) Teamword and collaboration 5) Confident Seiring dengan berkembangnya teknologi, cara belajar mengajar di era revolusi industri 4.0 juga mengalami perubahan. Internet dan komputer menjadi sarana yang akan memudahkan proses belajar mengajar. Proses pembelajaran yang dulunya harus dilakukan dengan tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, kini pada era revolusi industri 4.0 pembelajaran dapat dilakukan dengan kelas online melalui media sosial atau media lainnya yang mendukung proses pembelajaran online. Seiring dengan kecepatan pengaksesan data dan intenet, pemerintah Indonesia mulai tahun 2017 mencanangkan tiga jenis literasi (salah satunya literasi digital) dalam menghadapi revolusi industry 4.0 (Risdianto, 2019). Konsep literasi digital tidak hanya bertumpu pada "membaca" namun juga peningkatan kemampuan untuk menganalisis dan menggunakan informasiinformasi digital yang diperoleh (Aoun, 2017) untuk keperluan yang benar, menghindari hoax, dll.

Landasan Society 5.0 dan Kompetensi Society 5.0

Perkembangan era revolusi industri 4.0 diiringi dengan integrasi teknologi cyber dengan humaniora, yaitu Society 5.0. Pemahaman Society 5.0 sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Society 5.0 bermula dari negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern (AI, robot, IoT, dsb) untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat dimana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas Revolusi Industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia

Society 5.0 menjadi konsep tatanan kehidupan yang baru bagi masyarakat. Melalui konsep society 5.0 kehidupan masyarakat diharapkan akan lebih nyaman dan berkelanjutan. Orang-orang akan disediakan produk dan layanan dalam jumlah dan pada waktu yang dibutuhkan. Society 5.0 dapat diartikan sebagai sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Dalam era society 5.0 masyarakat dihadapkan dengan teknologi yang memungkinkan akses dalam ruang maya yang terasa seperti ruang fisik. Dalam teknologi society 5.0 AI berbasis big data dan robot untuk melakukan atau mendukung pekerjaan manusia. Berbeda dengan revolusi industri 4.0 yang lebih menekankan pada bisnis saja, namun dengan teknologi era society 5.0 tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial, usia, jenis kelamin, bahasa dan menyediakan produk serta layanan yang dirancang khusus untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan banyak orang.

Society 5.0 sebagai ekosistem yang komprehensif. Sebagai ekosistem yang komprehensif tatanan masyarakat tidak hanya dilihat dari aspek produksi (industri). Ekosistem masyarakat yang komprehensif mengarah pada aktifitas organisasi, industri, atau perusahaan dibuat lebih efisien. Society 5.0 fokus dalam perkembangan kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.

Sedangkan kompetensi Society 5.0 Menurut Mayumi (2018) adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based) yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Konsep yang diusung dalam Society 5.0 ini mengusung keseimbangan dalam 5 unsur utama yang ada dalam kehidupan seorang manusia, yaitu; Emosional, Intelektual, Fisikal, Sosial, dan; Spiritualitas untuk keseimbangan.

Memasuki era society 5.0 ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap orang, untuk mempersiapkan diri dalam persaingan yang semakin ketat, yaitu **Leadership**, Jiwa kepemimpinan karakter pemimpin identik dengan karakter kuat menghadapi setiap perubahan baru. Revolusi industri 4.0 tidak dapat dihindari atau dihentikan; **Language Skill**, Kemampuan bahasa asing pun harus dipersiapkan terutama untuk bahasa Inggris. Setelah tahun 2020, diperkirakan kemampuan kognitif menjadi keterampilan yang paling dibutuhkan, diikuti system skills, complex problem solving, content skills, dan process skills; **IT Literacy**, Konsekuensi era revolusi industri 4.0 yaitu penguasaan IT Literacy. Walaupun tidak memiliki kemampuan akademik dalam bidang informasi teknologi. Namun untuk mampu bersaing kemampuan IT harus di kembangkan. IT literacy merupakan fokus pada konsep Society 5.0. IT literacy merupakan bagian penting untuk Cognitive Flexibility (Fleksibilitas Mental); **Writing Skills**, Revolusi industri 4.0 dan society 5.0 mendorong tindakan cerdas untuk menganalisa, menginformasikan dan mengelola kemampuan yang terhubung dengan dunia fisik dan teknologi cerdas. Revolusi Industri 4.0 adalah revolusi berbasis Cyber Physical System yang secara garis besar merupakan gabungan tiga domain yaitu digital, fisik, dan biologi. Terwujud pada aspek kecerdasan buatan (artificial intelligence), mobile supercomputing, intelligent robot, self-driving cars, neuro-technological brain enhancements, era big data yang membutuhkan kemampuan cybersecurity, era pengembangan biotechnology dan genetic editing (manipulasi gen).

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan teknik analisis konten yang bersifat inferensial (inferential content analysis). Fokus penelitiannya terletak pada muatan dokumen buku dan jurnal mengenai ketimpangan social pendidikan karakter, Pendidikan Pancasila, Profil Pejara Pancasila dan Human Society 5.0 alasannya karena berusaha memahami dan memaknai pesan simbolik pada sebuah dokumen tersebut. Sumber data penelitian meliputi infografis, modul dan buku Pendidikan karakter, Pendidikan Pancasila, Standarisasi Kurikulum Merdeka, Profil Pelajar Pancasila dan 5.0 yang digunakan di jenjang perguruan tinggi dan diterbitkan penerbit nasional. Sesuai pertanyaan penelitian, datanya berupa materi Pendidikan Karakter Pancasila dan membangun profil pelajar Pancasila di era human society 5.0. melalui laman <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Panduan-Penguatan-Projek-Profil->

Pancasila.pdf/ yakni (1) Panduan Pengembangan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (2) Buku Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan karakter; (2) Infografis Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter; (3) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Kelas; (4) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Budaya Sekolah; (5) Buku Panduan Praktis PPK Berbasis Masyarakat; (6) Buku Panduan Praktis Pelibatan Tripusat Pendidikan dalam PPK oleh Kepala Sekolah; (7) Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter; dan (8) Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Prosedur analisis konten pada penelitian ini meliputi; (1) pengadaan data dengan mendeskripsikan pendidikan karakter Pancasila dan membangun profil pelajar Pancasila di era human society 5.0. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan deskripsi singkat muatan Nilai-nilai karakter yang terdapat dalam tiap tema buku teks beserta strategi pendekatan pendidikan karakter yang dipilih oleh penulis buku teks. (2) Pengurangan atau reduksi data Pengurangan data dimaksudkan untuk mendapatkan hal-hal yang penting sesuai tujuan penelitian serta membuang hal yang tidak relevan. (3) inferensi dengan berusaha sebaik mungkin agar tidak mengurangi makna simboliknya dan menggunakan konstruk analisis; (4) Analisis ranah konseptual mengenai muatan pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara serta pendekatan komprehensif dalam pendidikan karakter. Teknik analisis data yang digunakan yaitu, mengklasifikasikan, memaknai dan menyimpulkan.

3. RESULT AND DISCUSSION

Results and Discussion

Memasuki abad 21 Indonesia mengalami keterbukaan dan interaksi global yang semakin intensif dan masif. Menurut Rosenberg (2001), dengan berkembangnya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdapat lima pergeseran di dalam proses pembelajaran yaitu (a) Pergeseran dari pelatihan ke penampilan, (b) Pergeseran dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (c) Pergeseran dari kertas ke "online" atau saluran, (d) Pergeseran fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (e) Pergeseran dari waktu siklus ke waktu nyata. Penataan kembali atau transformasi pendidikan nasional Indonesia tersebut dapat dimulai dengan menempatkan kembali karakter sebagai ruh atau dimensi terdalam pendidikan nasional berdampingan dengan intelektualitas yang tercermin dalam kompetensi.

Dengan karakter yang kuat-tangguh beserta kompetensi yang tinggi, yang dihasilkan oleh pendidikan yang baik, pelbagai kebutuhan, tantangan, dan tuntutan baru dapat dipenuhi atau diatasi. Hal ini telah dilandaskan oleh berbagai pemikiran tentang pendidikan dan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pendidikan. Sebagai contoh, beberapa puluh tahun lalu Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, telah menandakan secara eksplisit bahwa "Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelec) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita" (Karya Ki Hadjar Dewantara Buku I: Pendidikan). Beberapa kemampuan yang harus dimiliki di abad 21 ini meliputi: leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, team-working.

Beberapa cara yang bisa dilakukan oleh dunia pendidikan di Indonesia untuk menghadapi society 5.0 yaitu yang pertama dilihat dari infrastruktur, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan perluasan koneksi internet ke semua wilayah Indonesia, karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini belum semua wilayah Indonesia dapat terhubung dengan koneksi internet. Kedua, dari segi SDM yang bertindak sebagai pengajar harus memiliki keterampilan dibidang digital dan berfikir kreatif.

Menurut Zulkifur Alimuddin, Director of Hafecs (Highly Functioning Education Consulting Services) menilai di era masyarakat 5.0 (society 5.0) guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas (Alimuddin, 2019) Ketiga, pemerintah harus bisa menyinkronkan antara pendidikan dan industri agar nantinya lulusan dari perguruan tinggi maupun sekolah dapat bekerja sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh industri sehingga nantinya dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Keempat, menerapkan teknologi sebagai alat kegiatan belajar – mengajar. Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Religius

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai

perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.

Nasionalis

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.

Mandiri

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai mandiri antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Gotong Royong

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.

Integritas

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas). Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi.

Ruang Interaksi Sosial Profil Pelajar Pancasila dalam Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0

Saat ini, tantangan dunia pendidikan semakin kompleks dan menuntut persiapan dan pemikiran yang sangat serius. Kita dihadapkan pada suatu perubahan yang cepat dan nonlinear. Ini sebagai akibat bergulirnya era Revolusi Industri 4.0. Kemajuan teknologi ini memungkinkan otomatisasi di hampir semua bidang. Belum usai hiruk-pikuk akibat Revolusi Industri 4.0, yang dibarengi perkembangan era disrupsi, tiba-tiba kita dikejutkan dengan munculnya Society 5.0.

Karakter Pancasila Dalam Menghadapi Era Society 5.0 Pada hakikatnya Pancasila lahir di antara banyak perbedaan serta beragamnya karakter merupakan produk asli Indonesia yang menjadi nilai dasar kehidupan dan senantiasa dijunjung tinggi oleh segenap masyarakat Indonesia. Tetapi kita tidak dapat menolak perubahan zaman yang diiringi berbagai tantangan bahkan ancaman yang harus dihadapi oleh Pancasila, Masyarakat Indonesia harus menyesuaikan terhadap kemajuan zaman tersebut dan secara tidak langsung akan mempengaruhi peradabannya terutama dalam kemajuan di bidang teknologi. Kecanggihan teknologi pada dasarnya diciptakan untuk membantu kemudahan hidup manusia dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari.

Meskipun demikian, teknologi juga bisa menjadi musuh manusia jika tidak dipakai secara bijaksana atau digunakan oleh tangan yang salah cenderung menjadi alat yang sangat membahayakan. Dalam menyikapi hal ini kita harus merubah mindset kita dari sebuah kekurangan menjadi sebuah tantangan untuk menyesuaikan nilai Pancasila agar menjadi konsep kehidupan yang mampu membangun masyarakat Indonesia yang berkarakter. Pancasila juga dikatakan sebagai ideologi bangsa merupakan

hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung makna falsafah untuk dijadikan dasar, azas, pedoman hidup bersama dalam negara Indonesia (Fadilah, 2019).

Konsep Society 5.0 diadopsi Pemerintah Jepang sebagai antisipasi terhadap tren global sebagai akibat dari munculnya Revolusi Industri 4.0. Society 5.0 adalah hal alami yang pasti terjadi akibat munculnya Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan berbagai inovasi dalam dunia industri dan juga masyarakat secara umum. Society 5.0 merupakan jawaban atas tantangan yang muncul akibat era Revolusi Industri 4.0 yang dibarengi disrupsi yang ditandai dunia yang penuh gejolak, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas.

Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0 seperti Internet on Things (internet untuk segala sesuatu), Artificial Intelligence (kecerdasan buatan), Big Data (data dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0, sebuah masa di mana masyarakat berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial oleh sistem yang mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Society 5.0 akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan menyelesaikan masalah sosial.

Dalam forum ekonomi dunia dirumuskan sepuluh kemampuan yang harus dimiliki guna menghadapi super smart society tersebut. Tiga kemampuan tertinggi yang dibutuhkan adalah kemampuan memecahkan masalah kompleks, berpikir kritis, dan kreativitas. Kemampuan mendengarkan secara aktif yang dibutuhkan sampai tahun 2015, diprediksi akan menghilang dari sepuluh kemampuan tersebut. Penguasaan ketiga kemampuan utama yang dibutuhkan masa depan menjadi tanggung jawab dunia pendidikan. Anak-anak yang sekarang duduk di bangku sekolah merupakan pemilik masa depan tersebut. Masa depan dengan konstruksi Masyarakat 5.0, tapi sekaligus berada pada era VUCA: penuh gejolak, tidak pasti, rumit, dan serba kabur. Tak ayal lagi, para pemegang masa depan tersebut tidak cukup dibekali dengan ilmu pengetahuan, tapi juga cara berpikir. Dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk menawarkan arah dalam menemukan solusinya. Harapannya, solusi yang dimunculkan bukanlah solusi usang tapi solusi yang memiliki nilai kebaruan sesuai konteks situasi yang baru pula. Itulah kreativitas dan inovasi. Penggunaan telepon genggam, tablet, atau laptop berikut koneksi internet, dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran. Pencarian bahan ajar sebagai materi diskusi atau pemanfaatan berbagai video pembelajaran yang tersedia gratis di berbagai situs-situs pendidikan seperti Khan Academy, Amazon Education, Ruang guru, Wikipedia, dan lainnya.

Yang terpenting adalah bijak menggunakan teknologi sehingga memberi makna positif bagi aktivitas pembelajaran. Society 5.0 menekankan pada manusianya, bagaimana manusia tersebut bisa melakukan antisipasi terhadap tren global dari akibat munculnya industry 4.0. Walaupun Indonesia belum menerapkan Society 5.0, tapi tetap saja sebuah negara harus mempersiapkan masyarakatnya untuk bisa beradaptasi dengan peradaban yang baru. Dimana zaman sekarang IPTEK sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, bahkan dari IPTEK tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk menghindari resiko yang akan muncul dalam masalah sosial, maka ada beberapa komponen untuk diterapkan dalam pendidikan. Komponen tersebut menyiapkan peserta didik untuk siap menghadapi Society 5.0. Untuk mewujudkan atau mempersiapkan Society 5.0 dalam bidang pendidikan, anak tidak cukup hanya sebatas memahami atau di berikan sebuah teori saja. Hal tersebut belum cukup untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi Society 5.0 melainkan cara berpikir. Cara berpikir ini untuk membiasakan peserta didik dalam beradaptasi ke depannya. Beberapa cara berpikir tersebut diantaranya harus kritis, konstruktif, dan inovatif. Seperti yang di ungkapkan Direktur HAFECS (Highly Functioning Education Consulting Services) Jakarta (mediaindonesia.com. 2019) era Society 5.0 menuntut siswa dan masyarakat untuk mampu berpikir kritis dan konstruktif. Dapat dilihat secara umum guru-guru kita belum mampu melakukan pengajaran dengan metode tersebut. Bisa dikatakan bahwa Indonesia belum siap menghadapi era Society 5.0.

Untuk mewujudkan atau mempersiapkan Society 5.0 dalam bidang pendidikan, anak tidak cukup hanya sebatas memahami atau di berikan sebuah teori saja. Hal tersebut belum cukup untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi Society 5.0 melainkan cara berpikir. Cara berpikir ini untuk membiasakan peserta didik dalam beradaptasi ke depannya. Beberapa cara berpikir tersebut diantaranya harus kritis, konstruktif, dan inovatif. Seperti yang di ungkapkan Direktur HAFECS (Highly Functioning Education Consulting Services) Jakarta (mediaindonesia.com. 2019) era Society 5.0 menuntut siswa dan masyarakat untuk mampu berpikir kritis dan konstruktif. Dapat dilihat secara umum guru-guru kita belum mampu melakukan pengajaran dengan metode tersebut. Bisa dikatakan bahwa Indonesia belum siap menghadapi era Society 5.0 .

Konsep pembelajaran di sekolah dalam menghadapi Society 5.0 perlu dikembangkan dengan beberapa komponen yang diantaranya: 1. Kemampuan HOTS dalam proses pembelajaran. HOTS (Higher, Order, Thinking, Skills) merupakan kemampuan dalam memecahkan masalah secara kompleks,berpikir kritis dan kreativitas. Penerapan HOTS dapat dilakukan dengan mengenalkan dunia nyata kepada peserta didik dengan permasalahan yang ada. Seperti masalah lingkungan dan kesehatan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. sehingga peserta didik diharapkan dapat menganalisis serta memecahkan masalah tersebut. 2. Pembaharuan orientasi pembelajaran pembelajaran yang futuristic, mengenalkan pembelajaran yang tidak hanya pada penguasaan materi tetapi juga perlu menghubungkan terkait dengan pemanfaatan untuk kemajuan masyarakat Society 5.0 . 3. Dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat. Untuk memberi ruang kepada peserta didik untuk menemukan konsep pengetahuan dan kreativitas.

Guru boleh memilih berbagai model pembelajaran seperti *discovery learning*, *project based learning*, *problem based learning*, dan *inquiry learning* . dari berbagai model tersebut mendorong peserta didik untuk membangun kreativitas serta berpikir kritis. 4. Pengembangan kompetensi guru. Kompetensi dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik guru juga perlu ditingkatkan agar mampu beradaptasi dengan *industry 4.0* dan *society 5.0*. dengan dibekali wawasan keilmuan, attitude dan skill merupakan ciri dalam mempersiapkan *society 5.0*. 5. Penyediaan sarpras dan sumber belajar yang futuristic sesuai kebutuhan berupa *smart building* berbasis IT berupa ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium yang didukung fasilitas IoT dan AI yang mendukung sumber belajar dan media belajar peserta didik.

Pancasila seharusnya menjadi sebuah kekuatan yang dapat mengikat secara moral bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Maka dari itu sebagai warga yang cinta akan Negara Indonesia harus senantiasa mengamalkan nilai Pancasila serta menjalankan semua fungsi dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa. Eksistensi Pancasila sendiri di dalam sejarahnya banyak mengalami hambatan serta ujian dalam berbagai bentuk penyelewengan di setiap pelaksanaan silanya. Pengaruh Globalisasi tentu tidak dapat kita tepiskan membawa dampak pada adanya "perubahan" paradigma dalam agenda pemahaman serta pengamalan Pancasila. Dengan adanya globalisasi, bangsa Indonesia telah memasuki periode baru dalam sejarah manusia. Suatu bentuk perubahan keadaan yang membawa perubahan cara berfikir dan juga cara kerja yang sangat berbeda dibandingkan dengan era sebelumnya. Teknologi baru seperti media elektronika, komunikasi serta kemajuan teknologi lain juga semakin mengubah tatanan era *Industri 4.0* atau sering disebut era *disrupsi* benarbenar telah menerobos batas-batas kehidupan termasuk batas wilayah negara, sehingga kejadian dan peristiwa di belahan bumi manapun dan pada waktu kapanpun dapat dilihat perkembangannya oleh pengamatan manusia. Hal tersebut yang menjadikan ruang dan waktu saat ini tidak lagi menjadi sebuah kendala, sehingga keadaan ini membuat dunia seperti ada pada genggaman tangan manusia (Suaila, 2019).

Beberapa pihak menilai Pancasila saat ini terlihat mulai kehilangan Ruhnya. Beberapa pelajar termasuk mahasiswa banyak yang lupa atau tidak hafal sila-sila dalam Pancasila, jadi untuk mengimplementasikan nilai-nilainya di rasa sangat sulit. Oleh karenanya untuk membangun rasa nasionalisme generasi muda saat ini membutuhkan usaha yang keras. Berdasarkan fakta tersebut di atas, salah satu cara untuk memunculkan rasa nasionalisme yakni dengan pendidikan karakter untuk mengembalikan identitas nasional serta jati diri bangsa. Pendidikan karakter dapat dimulai dengan penanaman ilmu pengetahuan atau ajaran tentang kebaikan untuk dapat diaplikasikan dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman pengetahuan tentang nilai Pancasila dapat melalui pendidikan pancasila dan kewarganegaraan yang dipandang penting untuk mengembalikan nilai-nilai moral dan nasionalisme dan membangun jiwa Pancasilais.

Tujuan diberikannya pendidikan pancasila dan kewarganegaraan pada siswa maupun mahasiswa untuk membentuk warga negara berkarakter yang baik berlandaskan pancasila mempunyai sikap religius, berkemanusiaan, beradab, memiliki jiwa nasionalisme, bertanggungjawab serta adil terhadap lingkungan sosialnya, dan juga berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Eksistensi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan sesuatu yang bersifat esensial bagi unit pendidikan formal baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Sudah seharusnya apabila nilai Pancasila terus digaungkan serta disebarluaskan secara masif, melalui berbagai media serta dalam pembelajaran formal maupun informal. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan sebagai salah satu instrumen dalam membangun karakter Pancasila pada generasi muda adalah suatu keniscayaan karena siswa dan mahasiswa adalah agen perubahan (*agent of change*) sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa Indonesia (Malik, 2020).

Dalam membangun pola kehidupan yang diharapkan itu, perlu dikembangkan sistem pendidikan karakter dengan capaian akhir berupa penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Pancasila merupakan falsafah yang menjadi pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai kultur kita bangsa Indonesia yang mempunyai ciri karakteristik unik yaitu adat ketimuran. Pendidikan karakter harus dilakukan diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga dapat tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku santun, mampu hidup baik secara individu ataupun sosial, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara, mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang dipeluknya. Pengajaran karakter Pancasila dapat dimuat di dalam silabus matakuliah maupun mata pelajaran yang harus mencakup filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila sendiri harus bercirikan integralistik, etis serta religius.

Dalam menjalankan kegiatan pengajaran maka dibutuhkan seorang pendidik yang sadar akan tanggungjawab moral Pancasila serta tahu akan pentingnya pendidikan karakter. Seorang pengajar dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila harus memahami nilai-nilai antara lain: 1) harus memahami nilai-nilai Pancasila tersebut; 2) menjadikan Pancasila sebagai norma hukum dalam kehidupan; 3) memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dengan baik. Setidaknya dengan menjalankan tiga nilai tersebut, diharapkan cita-cita luhur bangsa yang ingin dilaksanakan melalui pendidikan berkarakter sesuai falsafah Pancasila dapat terwujud. Kita sadar bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa kita tolak dan kita harus segera menyesuaikannya. Sehingga salah satu cara untuk menghadapi perkembangan tersebut dengan membangun karakter bangsa Indonesia yang kuat dengan cirikhas tersendiri dibandingkan Negara lain (Semadi, 2019).

Nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia telah terkristalisasi menjadi nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila. Berdasarkan hal tersebut maka Pancasila sudah semestinya ditempatkan sebagai filter dalam berbagai perkembangan kehidupan masyarakat termasuk juga dalam pembangunan hukum guna menghadapi dampak buruk dari globalisasi sebagai akibat adanya perkembangan IPTEK.

Pancasila sebagai filter dalam transformasi nilai-nilai global pada kehidupan nasional, karena pada dasarnya globalisasi tidak dapat diterima secara bulat. Perkembangan IPTEK membawa manusia kepada kehidupan yang tanpa batas, dimana semua informasi dari siapapun dan dari mana pun dapat langsung diterima oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan tidak semua bentuk perkembangan globalisasi serta informasi tersebut dapat diterima dan dapat diterapkan pada kehidupan bangsa Indonesia. Perkembangan masyarakat Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai asli bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dalam hal ini nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi sangat penting sebagai landasan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi sebagai akibat perkembangan IPTEK.

Semakin pesatnya perkembangan IPTEK, keberadaan ideologi Pancasila membantu masyarakat menciptakan jatidiri bangsa sendiri untuk menghadapi tekanan arus globalisasi yang sangat kuat (Ismayawati, 2017). Sebagai bekal dalam mempersiapkan diri menghadapi perkembangan zaman maka perlu membangun karakter anak bangsa. Karakter dikembangkan melalui beberapa tahap antara lain: pengetahuan (Knowing), pelaksanaan (Acting), dan kebiasaan (habit). Karakter manusia tidak hanya terbatas pada pengembangan pengetahuan saja.

Seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang kebaikan hanya akan menjadi kebiasaan saja untuk melakukan kebaikan tersebut. Berbeda dengan karakter yang akan melekat pada pribadi manusia menjangkau wilayah emosi serta kebiasaan diri. Terkait dengan pendidikan karakter melalui pendidikan formal, tidak pernah lepas dari faktor pendukung pendidikan karakter antara lain: faktor kepribadian, peran keluarga, peran pendidik serta lingkungan. Proses pendidikan karakter juga dipengaruhi oleh totalitas penguatan psikologis yang mencakup seluruh potensi setiap individu (aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik) serta fungsi totalitas sosiokultural pada konteks interaksi di dalam keluarga, satuan pendidikan serta masyarakat (Yalida, 2019).

Pembangunan karakter masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila membutuhkan progress yang panjang. Permatasari (2016) menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembinaan karakter bangsa yaitu terciptanya masyarakat yang bersikap santun serta bertingkah laku secara baik berdasar Pancasila. Perilaku yang baik sebagai warga negara dapat diterapkan pada kehidupan politik, ekonomi, maupun sosial budaya berdasarkan pada konsep, prinsip serta nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Beberapa sikap yang ingin dicapai dalam pembangunan serta pembinaan karakter Pancasila pada masyarakat Indonesia antara lain memiliki sikap: 1) Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan menghormati dan menerima

pluralitas agama yang ada di Indonesia. 2) Mempunyai sikap dan berperilaku menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan menempatkan hak asasi manusia secara proporsional sesuai dengan konsep serta prinsip yang terkandung dalam Pancasila. 3) Memiliki semangat kebangsaan, menjunjung tinggi existensi Negara Kesatuan Republik Indonesia baik untuk kepentingan pribadi dan golongan selalu diselaraskan dengan kepentingan bangsa. 4) Mempunyai pengetahuan, sikap, perilaku serta kemampuan dalam menerapkan demokrasi yang bersendi pada nilai Pancasila. 5) Selalu untuk mewujudkan keadilan sosial pada kehidupan masyarakat. 6) Berupaya mengembangkan nilai dan kompetensi secara universal berkarakter Pancasila.

Sementara itu (Fatimah & Dewi, 2021) menjelaskan pembangunan karakter bangsa menjadi hal yang paling penting dalam menghadapi segala tantangan kehidupan saat ini dan kehidupan mendatang. Pancasila sebagai arah pandangan kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan untuk membenahi tatanan kehidupan. Nilai-nilai yang ada pada setiap sila Pancasila dimaknai sebagai sesuatu yang tepat guna dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap generasi mempunyai kebutuhan pembangunan karakter kebangsaan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nilai karakter Pancasila meliputi beberapa karakter yakni pertama, menerapkan nilai Pancasila dalam satuan pendidikan baik formal maupun informal. Hal tersebut dapat dimulai dengan cara mencontohkan karakter yang baik bagi seorang pendidik. Kedua, setiap pembelajaran yang ada dalam satuan pendidikan wajib menyisipkan nilai-nilai karakter Pancasila pada peserta didik. Ketiga, meningkatkan sosialisasi akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter warga Negara agar memiliki pandangan hidup yang benar berdasarkan Pancasila. Keempat, menyamakan persepsi masyarakat terhadap Pancasila agar tidak terdapat multi-tafsir dalam memberikan makna atas nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Kelima, penanaman karakter harus di mulai sejak usia dini misalnya di usia sekolah dasar karena di usia tersebut karakter manusia lebih mudah dibangun.

Zuriah (2021) menyampaikan sejalan dengan adanya tuntutan perkembangan zaman pada masyarakat kehidupan berbangsa dan bernegara yang juga dipengaruhi oleh kemajuan globalisasi dengan segala tantangan di dalamnya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi sebuah alat di dalam dunia pendidikan dalam agenda pengembangan karakter dan tidak cukup sekedar melalui pendidikan politik saja. PPKn sebagai mata pelajaran atau matakuliah mempunyai misi sebagai berikut: PPKn sebagai pendidikan politik, sehingga program pendidikan seperti ini harus memberikan pengetahuan, membentuk sikap dan keterampilan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat pengetahuan politik (*political literacy*), mempunyai kesadaran politik (*political awareness*), serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik (*political participation*) yang tinggi. PPKn sebagai pendidikan nilai (*value education*) sehingga melalui PPKn diharapkan dapat tertanam dan mentransformasikan nilai, moral, serta norma yang baik oleh kehidupan berbangsa kepada diri peserta didik, sehingga memberi dukungan dalam upaya pembangunan karakter nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka nilai-nilai Pancasila wajib menjadi rujukan utama dalam upaya pendidikan nilai.

Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila

Profil Pelajar Pancasila sesuai Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) sebagaimana tertuang dalam dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020- 2024, bahwa "Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif". Gagasan terkait dengan Profil Pelajar Pancasila ini dapat ditelusuri secara lengkap dalam website Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud di link berikut: <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/>. Bahkan, secara infografik dibuat sangat menarik oleh Puspeka terkait dengan deskripsi Profil Pelajar Pancasila itu sendiri. Lebih spesifiknya, infografik Profil Pelajar Pancasila dapat diakses pada website berikut: https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=2817.

Jika diperhatikan lebih detail, ada perbedaan pada salah satu indikator Profil Pelajar Pancasila yang dirilis website <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/> (versi Sekolah Penggerak Kemdikbud yang terdapat pada gambar 1) dengan website https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=2817 (versi Pusat Penguatan Karakter di atas). Namun begitu, perbedaan ini bukanlah sesuatu yang kontra, melainkan komplementer. Pada website Pusat Penguatan Karakter tertera infografis Profil Pelajar Pancasila yang lebih lengkap yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia,

pada indikator Profil Pelajar Pancasila versi website sekolah penggerak ialah berakhlak mulia. Selain indikator tersebut, lainnya sama, yaitu mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebhinekaan global.

Indikator pertama menjelaskan bahwa pelajar Indonesia yang berakhlak mulia, maksudnya ialah bahwa akhlak mulia dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia Indonesia perlu memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa elemennya ialah: akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Indikator kedua menggambarkan tentang kebhinekaan global, di mana yang dimaksudkan ialah bahwa Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap memiliki pikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Adapun elemen kunci dalam indikator berkebhinekaan global ialah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggungjawab terhadap pengalaman kebhinekaan.

Indikator ketiga terkait dengan Profil Pelajar Pancasila yaitu Gotong Royong. Dalam hal ini dijelaskan bahwa gotong royong yang dimaksud ialah Pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen kunci dalam Profil Pelajar Pancasila dengan indikator gotong royong ialah melakukan kolaborasi atau kerjasama antar pelajar, kerjasama dalam bidang-bidang yang positif dalam konteks saling membantu dan saling menolong sesama, kemudian kepedulian yang merupakan sebuah sikap penting yang perlu dimiliki untuk dapat menggerakkan perilaku gotong royong, dan yang terakhir ialah berbagi, sikap dimana perlu adanya latihan karena berbagi merupakan sikap mulia yang dapat mewujudkan indikator gotong royong dalam Profil Pelajar Pancasila ini.

Indikator keempat yaitu mandiri, yang dimaksud mandiri dalam Profil Pelajar Pancasila ini ialah Pelajar Indonesia yang bertanggung jawab atas sebuah proses dan juga hasil belajarnya. Adapun elemen kunci profil mandiri ini ialah adanya kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. Indikator yang kelima dari Profil Pelajar Pancasila ini ialah bernalar kritis. Bernalar kritis yang dimaksud dalam hal ini ialah pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan kemudian menyimpulkannya. Adapun elemennya yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Yang terakhir, indikator keenam dari Profil Pelajar Pancasila ialah kreatif.

Kreatif yang dimaksud dalam Profil Pelajar Pancasila ini ialah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak, dengan elemennya yaitu menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal pula. Orisinalitas dalam indikator kreatif ini sangat penting dimana perilaku duplikasi atau menirukan orang lain tanpa disertai sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sebuah perilaku-perilaku yang negatif dan bahkan merugikan, misalnya mengakui karya orang lain sebagai karyanya sendiri. Keenam indikator Profil Pelajar Pancasila ini sangat ideal bagi bangsa Indonesia.

Sesuai dengan rujukannya yaitu ideologi Pancasila, maka tidak mengherankan isinya-pun sangat ideal. Pertanyaan kritisnya ialah, bagaimana kondisi di lapangan terkait dengan Profil Pelajar Pancasila ini? Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) telah merangkul proses dari usaha untuk mewujudkan Indikator Profil Pelajar Pancasila ini dalam sebuah buku dengan judul "Capaian Satu Tahun Kolaborasi Dengan Tokoh Penggerak dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila". Buku ini merangkul bagaimana para tokoh penggerak "membumikan" Profil Pelajar Pancasila di satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah di Indonesia. Dalam dokumen buku ini, dijelaskan mengenai capaian-capaian yang telah dilakukan dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Hal ini dirangkum dalam beberapa sub bab pembahasan, seperti "Menjadi Milenial yang Pancasila", "Seru Belajar Kebiasaan Baru", "Tetap Produktif di Masa Penuh Tantangan", "Menguatkan Literasi Memajukan Bangsa", "Pahlawan Masa Kini", dan "Anti Kekerasan Berbasis Gender". Penjelasan capaian satu tahun kolaborasi dengan tokoh penggerak untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila ini diawali dengan penngantar dari Kepala Pusat Penguatan Karakter Bapak Hendrarman yang memaparkan tentang relevansi Pancasila di masa kini. Beliau memaparkan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penguatan Karakter atau yang biasa disebut Puspeka mendapat apresiasi baik langsung atau tidak langsung dari beberapa pihak, terkait program yang telah dilaksanakan. Namun sesungguhnya capaian

tersebut merupakan buah dari arahan pimpinan, kolaborasi, dan sinergitas dengan berbagai pihak, baik di internal maupun eksternal Kemendikbud, termasuk pemerintah daerah dan organisasi mitra. Khusus di internal Puspeka, kami berupaya membangun suasana lingkungan kerja yang siap bekerja dengan keras, cerdas, cermat, tuntas, ikhlas, dan mengedepankan kebersamaan” (Puspeka, 2020: 16).

Pada dasarnya, capaian pelaksanaan program Puspeka terhimpun dari 4 (empat) kelompok kerja, yaitu kajian dan produksi konten, penyebarluasan konten, pemantauan dan evaluasi, serta pendukung dan administratif. Dari situlah lahir berbagai program yang menurut pihak lain inovatif dan mengacu pada arahan dan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu di antaranya bagaimana memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Puspeka, 2020: 16).

Kondisi di lapangan terkait dengan usaha mewujudkan Profil Pelajar Pancasila di dunia pendidikan sudah dilakukan dengan berbagai macam cara dan inovasi oleh Puspeka dan menggandeng tokoh penggerak dari seluruh Indonesia dan berasal dari berbagai daerah dan berbagai macam latar pendidikan. Puspeka berupaya mewujudkan generasi muda yang cerdas berkarakter melalui kampanye komunikasi publik pada berbagai media, meliputi media sosial, media cetak, Iklan Layanan Masyarakat (ILM), film pendek, sinetron, festival/mega events, pergelaran musik, pameran, sayembara, kunjungan museum virtual, kemah karakter, dan lainlain (Puspeka, 2020: 17). Kesemuanya ini dilakukan dengan sistem kerja yang terarah dan terstruktur disertai dengan pendokumentasian dan evaluasi. Salah satu target yang hendak dicapai dari mewujudkan Profil Pelajar Pancasila ini, ialah membentuk generasi milenial yang Pancasilais. Milenial atau sering disebut Generasi Y, adalah mereka yang kini berada pada rentang usia sekitar 20 hingga 40 tahun. Dengan kata lain, hanya kelahiran 1980 sampai 1990 atau 2000-an awal yang masuk angkatan generasi milenial atau istilah kerennya disebut generasi ‘zaman now”.

Lantas, benarkah milenial tidak memiliki masalah sekompleks generasi sebelumnya, dikarenakan generasi ini tumbuh dengan dukungan kemajuan teknologi digital, sehingga segala pekerjaannya bisa dilakukan serba cepat?. Atau jangan-jangan, mereka justru memiliki problematika yang lebih besar, terutama saat mengenali jati dirinya sebagai manusia Indonesia seutuhnya (Puspeka, 2020: 23). Di tengah keresahan tersebut, hal-hal positif terus dilakukan Puspeka dengan menggandeng tokoh-tokoh milenial untuk berkolaborasi mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. Kondisi lapangan yang terjadi terkait dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila ini dijelaskan oleh Puspeka seperti keadaan dalam masa pandemi Covid-19, kabar baik tersiar dari ujung barat Indonesia. Eko Wahyu Jamaluddin, seorang Guru PPKn di Aceh Besar berhasil menciptakan media pembelajaran jarak jauh yang mumpuni berbasis teknologi digital. Eko menginisiasi aplikasi pembelajaran bertajuk konstitusiku yang dapat digunakan para siswa selama mengikuti pembelajaran jarak jauh. Menurut Eko, “paling tidak aplikasi ini merupakan langkah awal untuk menuju pembelajaran abad 21 yang bergeser dari metode tatap muka ke digital” (Puspeka, 2020: 32). Eko adalah salah satu contoh di lapangan yang menunjukkan sikap-sikap uletnya, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Hal-hal seperti ini juga dilakukan oleh tokoh-tokoh penggerak dalam dunia pendidikan. Hal ini diperkuat dengan gambar 1.

Tabel 1
Petikan Inspiratif Tokoh Penggerak Profil Pelajar Pancasila

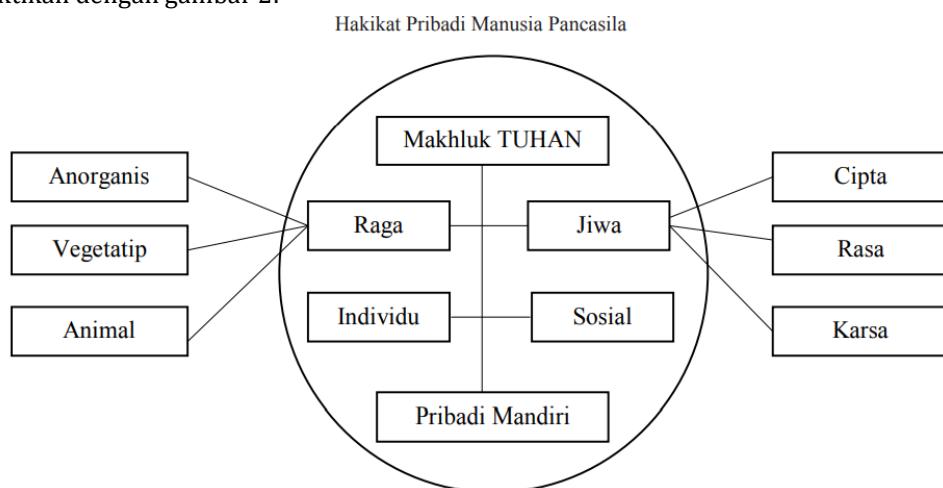
Nama Tokoh	Posisi / Aktif Sebagai	Petikan Inspiratif
Hilman Farid	Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI	“Kenali sejarah (bangsa)mu, kenali kekuatanmu, Sebab dengan modal itulah kita bisa melakukan hal-hal luar biasa baik sekarang maupun di masa depan”
Iwan Syahril	Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud RI	“Luar biasa memang tantangan kita di masa pandemi ini. Janganlah patah hati, terus belajar dan berbagi untuk mencari solusi”
Najelaa Shihab	Tokoh Pemerhati Pendidikan	“Budaya sekolah yang melebur dengan nilai-nilai Pancasila akan membuat Pancasila terus hidup dan berkesan di dalam diri siswa. Keragaman bangsa harus diapresiasi dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari”
Risa Santoso	Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang	“Kolaborasi menjadi hal yang paling kuat, jika dibandingkan dengan (kemampuan) berpikir kritis, serta berkomunikasi”.
Atalia Paratya Kamil	Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat	“Cinta itu akan tetap ada karena selalu dipupuk dan dirawat. Termasuk cinta kepada bangsa dan negara. Karena itu, pupuklah sedini mungkin hingga akarnya kuat dan tak mudah tergoyahkan”
Safhira Alfarisi	Founder Xchange Hamada dan Yayasan Beasiswa 10.000	“Agama merupakan pondasi utama yang membentuk kepribadian diri. Sebab pada dasarnya, seluruh agama mengajarkan kebaikan”

Sumber: Puspeka, 2020: 34-35

karakter Pancasila yang diwujudkan melalui peti wujudan from telaja Pancasila ini merupakan sebuah

bergerak
or Profil
ndonesia
alah satu
nguatan

gagasan estafet dari masa ke masa. Hal ini dilatarbelakangi oleh keresahan banyak pihak terkait dengan kondisi kebangsaan manusia Indonesia. Peneliti menganalisis bahwa setiap generasi pada masanya selalu ada yang memikirkan dan bergerak untuk melakukan aksi terkait dengan penguatan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan menjadi manusia Pancasila pada prinsipnya merupakan cita-cita luhur yang harus terus berusaha diwujudkan sampai kapanpun. Ide atau gagasan manusia Indonesia yang sesuai Pancasila dimulai sejak Pancasila itu sendiri disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai dasar falsafah negara. Manusia Pancasila tidak dapat lepas dari hakikat manusia itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Wreksosuhardjo (2007: 48-49) bahwa dalam kajian hakikat manusia, manusia yang dimaksud di sini ialah manusia yang seutuhnya. Jadi bukan pemahaman terhadap manusia secara segmental, seperti animal rasional, homo faber, homo ekonomikus, zoon politicon, dan sebagainya. Menurut pandangan yang utuh ini, pada hakikatnya manusia itu ialah monopluralisme (kesarwatunggalan) dari keseluruhan unsur-unsurnya yang berpasang-pasangan monodualis ragajiwa, monodualis individu-sosial, kedudukan monodualis makhluk tuhan-pribadi mandiri, yang kesemua unsur tersebut bersatu secara organis, harmonis dan dinamis (Notonagoro, dalam Wreksosuhardjo, S, 2007). Monodualis raga-jiwa itu susunan atau senyawa kodrat namanya. Monodualis individu-sosial itu sifat kodrat namanya. Adapun monodualis makhluk tuhan-pribadi mandiri itu kedudukan kodrat di hadapan Tuhan namanya. Raga memiliki tiga anasir: anorganis, vegetatif, dan animal. Sedangkan Jiwa memiliki tridaya jiwa: pikir, perasaan, kehendak (cipta, rasa, karsa). Karena raganya, manusia memiliki nafsu-nafsu badaniah, seperti: nafsu makan, dan minum, nafsu seksual. Karena jiwanya, manusia memiliki nafsu-nafsu rohaniah, seperti: nafsu menguasai, nafsu ingin memiliki, nafsu ingin menang sendiri, dan sebagainya (Wreksosuhardjo, 2007: 48-49). Di buktikan dengan gambar 2:



Sumber: Wreksosuhardjo, 2007: 49

in terkait dengan mewujudkan manusia Indonesia yang ideal sesuai dengan Pancasila merupakan gagasan yang tidak lekang oleh waktu. Hanya saja, setiap generasi punya caranya sendiri. Hal yang lebih penting dari masing-masing gagasan itu, menurut hemat peneliti ialah bagaimana action atau implementasi dari setiap gagasan tersebut. Ide atau gagasan harus terus dijaga bahkan diasah untuk lebih cemerlang, namun implementasi dari ide dan gagasan itu lebih utama untuk menentukan evaluasi dan langkah selanjutnya. Saat ini program penguatan karakter yang dilakukan dan untuk kita dukung bersama ialah sebuah cita-cita untuk mewujudkan generasi manusia Pancasila yang bertajuk Profil Pelajar Pancasila.

4. CONCLUSION

Profil Pelajar Pancasila berakar pada Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) sebagaimana tertuang dalam dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, bahwa “Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif”. Keenam indikator ini dirumuskan dalam rangka untuk membentuk SDM yang unggul, pelajar

sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil Pelajar Pancasila berimplikasi pada pembentukan ketahanan pribadi peserta didik atau siswa.

Profil Pelajar Pancasila memiliki tujuan utama yaitu terjaganya nilai luhur dan moral bangsa, kesiapan untuk menjadi warga dunia, perwujudan keadilan sosial, serta tercapainya kompetensi Abad 21. Di jiwa dan perilaku sehari-hari di dalam komunitas maupun profesi, kita harus memiliki profil pelajar Pancasila. Pelajar yang dimaksud di sini adalah SDM unggul yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak sekadar untuk dipahami, tetapi yang sangat penting dan bermanfaat ialah bagaimana mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik di keluarga, masyarakat, satuan pendidikan, maupun tempat kita bekerja dan berusaha. Hal ini dimulai dengan diwujudkan ketahanan pribadi yang kemudian akan membentuk ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, ketahanan wilayah, dan ketahanan nasional.

Dalam menyongsong era society 5.0 tentu akan banyak tantangan dan terjadi perubahan yang juga akan membawa dampak negatif seperti lunturnya moral maupun karakter bangsa. Revolusi industri 5.0 atau yang lebih dikenal dengan era super smart society diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019, sebagai sebuah antisipasi dari gejolak disrupsi perkembangan akibat revolusi industri 4.0 yang membawa ketidakpastian secara kompleks. Pembangunan karakter masyarakat menjadi satu solusi terbaik salah satunya melalui satuan pendidikan sebagai gerbang utama untuk mencetak SDM unggul. Dunia pendidikan yang di daulat mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat tidak lepas dari dukungan semua elemen serta pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat (ormas) dan masyarakat yang wajib turut andil dalam menyambut era society 5.0 mendatang. Di era society 5.0, para pendidik harus mempunyai keterampilan dibidang digital literacy dan kreatifitas berfikir. Pendidik juga dituntut untuk lebih inovatif menggunakan media pengajaran yang menarik dan dinamis dalam memfasilitasi pembelajaran baik di kelas maupun jenis pembelajaran di luar kelas. Beberapa hal yang wajib dimiliki para pendidik di era society 5.0 di antaranya kemampuan dalam memanfaatkan internet of things (IoT) pada dunia Pendidikan, telah familiar dengan sistem virtual augmented reality dalam dunia pendidikan, serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di dunia pendidikan dan senantiasa mengidentifikasi setiap kebutuhan pembelajaran baik sebagai pengajar maupun yang dibutuhkan oleh peserta belajar.

5. REFERENCES

- Anggraini, S., Afrizal, A., & Indradin, I. (2019). Regulasi Konflik Pemilu (Studi Kasus Resolusi Konflik Pilkada 2015 dan Persiapan Pemilu 2019 di Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 21(2), 177-184.
- A.Barlian, A. E., & Herista, A. D. P. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa (Development Of Indonesian legal System Based On Pancasila Values As A Nation Political Ideology). *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, Vol. 9(No. 1), 550–551. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/208>
- Abidin, N. F. (2020). Pancasila Sebagai The Living Values Dalam Pengalaman Sejarah Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Candi*, Volume 20(No.1), 107. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/41334>
- Ahmad, I. (2018). Proses Pembelajaran Digital Dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan. Kemenristek Dikti*.
- Aoun, J. (2017). *Robot-Proof: Higher Education In The Age Of Artificial Intelligence*. Us: Mit Press
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2019, *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, Jakarta: Polling Indonesia. Data Survei Diambil dalam Kurun Waktu 9 Maret-14 April 2019, dan Dirilis Tahun 2019, hh. 7.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2019, *Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet Indonesia*, Jakarta: Polling Indonesia. Data Survei Diambil dalam Kurun Waktu 9 Maret-14 April 2019, dan Dirilis Tahun 2019, hh. 46.

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 2020, Teropong Radikalisme, Diakses di .
- Burlian, P. (2020). Pemikiran Soekarno Dalam Perumusan Pancasila. *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol 5(No 2), 145.
- Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, 2019, Kondisi Radikalisme Termutahir di Indonesia, Jakarta.
- Esy, 2021, *jppn.com*, 23/01/2021, Kasus Intoleransi di SMKN 2 Padang, Kemendikbud Keluarkan Pernyataan Tegas, Editor: Esy. Diakses di , Diakses pada 12 Juni 2021.
- Fadilah, N. (2019). Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, Vol. 2(No. 2), 74. doi: <https://doi.org/10.30871/deca.v2i02.1546>
- Faruqi, U. A. (2019). Survey Paper: Future Service In Industry 5.0. *Jurnal Sistem Cerdas* 02 (01), 67–79.
- Fatimah, S., & Dewi, D. A. (2021). Pengimplementasian Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Jati Diri Anak Bangsa. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, Vol. 1(No. 5), 6. <https://journal.actualinsight.com/index.php/antropocene/article/view/205/139>
- Handitya, B. (2019). Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. *Adil Indonesia Jurnal*, Volume 2(Nomor 1), 18. <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/AIJ/article/view/370> \
- Handitya, B. (2020). Pendidikan Pancasila. CV. MAHATA. Ismayawati, A. (2017). Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 8(No. 1), 57–59. doi: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v8i1>
- Hidayat, Anwar. “Kesenjangan Sosial Terhadap Pendidikan Sebagai Pengaruh Era Globalisasi”. *Jurnal Justisi Hukum* ISSN 2528-2638 Vol 2 (2017).
- Hidayat, M. (2014). Problematika Kesehatan Di Pesantren (Suatu Kajian Proses Dalam Pendidikan Kesehatan Budaya Di Pesantren X). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(1), 25-36.
- Indar Sabri, “Peran Pendidikan Seni Di Era Society 5.0 untuk Revolusi Industri 4.0,” in *Seminar Nasional Pascasarjana 2019*, vol. 2 (Semarang: Pusat Pengembang Jurnal Universitas Negeri Semarang, 2019), 343, <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpasca/article/view/302>.
- Jiwandono, I. S., & Nurbeni, I. (2019). Persepsi Mahasiswa Terhadap Fungsi Pancasila Sebagai Weltanschauung Dalam Upaya Mengatasi Merosotnya Nilai Kebangsaan. *ELSE (Elementary School Education Journal)*, Volume 3(Nomor 2), 36–37. doi: <http://dx.doi.org/10.30651/else.v3i2.3166>
- Kalidjernih, Freddy K., 2011, *Puspa Ragam, Konsep dan Isu Kewarganegaraan*, Bandung: Widya Aksara.
- Kartadinata, Sunaryo. "Terapi dan Pemulihan Pendidikan." Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia (2009).
- Kearney, 2020, *Dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mei, 2020.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, *Sekolah Penggerak dan Profil Pelajar Pancasila*, Diakses di link .
- Khozim, W., 2013. “Sikap Keagamaan dan Potensi Radikal Agama Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama,” dalam *Edukasi*, Vol 11, No. 3, hh. 289-304.

- Latif, Yudi, 2018, *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*, Jakarta: Mizan. Pusat Penguatan Karakter, 2020, *Infografis Profil Pelajar Pancasila*, diakses di .
- Lie, Anita, 2021, *Profil Pelajar Pancasila dan Konsolidasi di Sekolah*, Kompas, edisi Jumat, 29 Januari 2021.
- Malik, A. (2020). Membumikan Ideologi Pancasila Melalui Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membangkitkan Nasionalisme. *Jurnal EduTech*, Vol. 6(No. 1), 105–106. <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter--748-20200704203236.pdf>
- Megawangi. 2007. *Pendidikan Karakter Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*. Cetakan Kedua. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Mulyasa. 2011. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pemerintah, P. (2005). *Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional RI
- Permatasari, L. (2016). *Membangun Pendidikan dan Membina Karakter Bangsa Berlandaskan Nilai-nilai kebangsaan*. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banjar. <https://bpkad.banjarkab.go.id/>
- Pradipto Bhagaskoro, Pasopati, R. U., & Syarifuddin. (2019). Pancasila Dalam Interaksi Kearifan Lokal dan Ideologi Transnasional. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, Vol. 1(No. 2), 128.
- Pratiwi, Y. D. (2020). Peran Pancasila Sebagai Filter Ideologi Bangsa (Studi Kasus Konsep Negara Khilafah). *Jurnal DEFENDONESIA*, Vol. 4(No.r 2), 19–20.
- Pusat Penguatan Karakter, 2020, *Capaian Satu Tahun Kolaborasi dengan Tokoh Penggerak dalam Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila*, Jakarta: PUSPEKA.
- Rahayu, K. N. S. (2021). Sinergi Pendidikan Menyongsong Masa Depan Indonesia Di Era Society 5.0. *EDUKASI: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. 2(No. 1), 95–97. <http://jurnal.stahmpukuturan.ac.id/index.php/edukasi/article/view/1395>
- Risdianto, E. (2019). *Akademia*. Retrieved 07 2019, 19, From https://www.Academia.Edu/38353914/Analisis_Pendidikan_Indonesia_Di_Era_Revolusi_Industri_4.0.Pdf
- Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Implementasinya dalam Berbagai Bidang. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol. 3(No. 1), 88–94.
- Salouw, Joniel Hendrik, Suharno, Rostin Talapessy, 2020, “Peran Guru Dalam Meningkatkan Karakter Disiplin Untuk Mewujudkan Ketahanan Pribadi Siswa Melalui Pembelajaran PPKn (Studi Kasus Di SMA 1 Wonreli Maluku Barat Daya)”, dalam *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 26 No. 3, Desember 2020 hh. 380-398.
- Samsu. (2017). *Research Methods: Theories and Applications of Qualitative, Quantitative Research, Mixed Methods, and Research & Development*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Saputra, Ananta. "Menuju Sistem Pendidikan Global." *Jurnal Fakultas Hukum UII* 31.67 (2008). Anas, Azwar Yusran, Agus Wahyudi Riana, and Nurliana Cipta Apsari. "Desa dan Kota dalam Potret Pendidikan." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2.3 (2015).
- Skobelev, P., & Borovik, Y. S. (2017). On The Way From Industri 4.0 To Industri 5.0: From Digital Manufactureing To Digital Society. *International Scientific Research Journal «Industri4.0»*, 307- 311.

- Yusnaini, Y. &. (2019). Era Revolusi Industri 4.0: Tantangan Dan Peluang Dalam Upaya Meningkatkan Literasi Pendidikan. Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas Pgris Palembang. Palembang.
- Zuchdi, Darmiyati dan Wiwiek Afifah. 2019. Analisis Konten, Etnografi & Grounded Theory, Dan Hermeneutika Dalam Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuriah, N. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Polysynchronous di Era New Normal. Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol. 6(No. 1), 18. doi: <https://doi.org/10.21067/jmk.v6i1.5086>.